KOMUNIKASI & GERAKAN PERUBAHAN

Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik

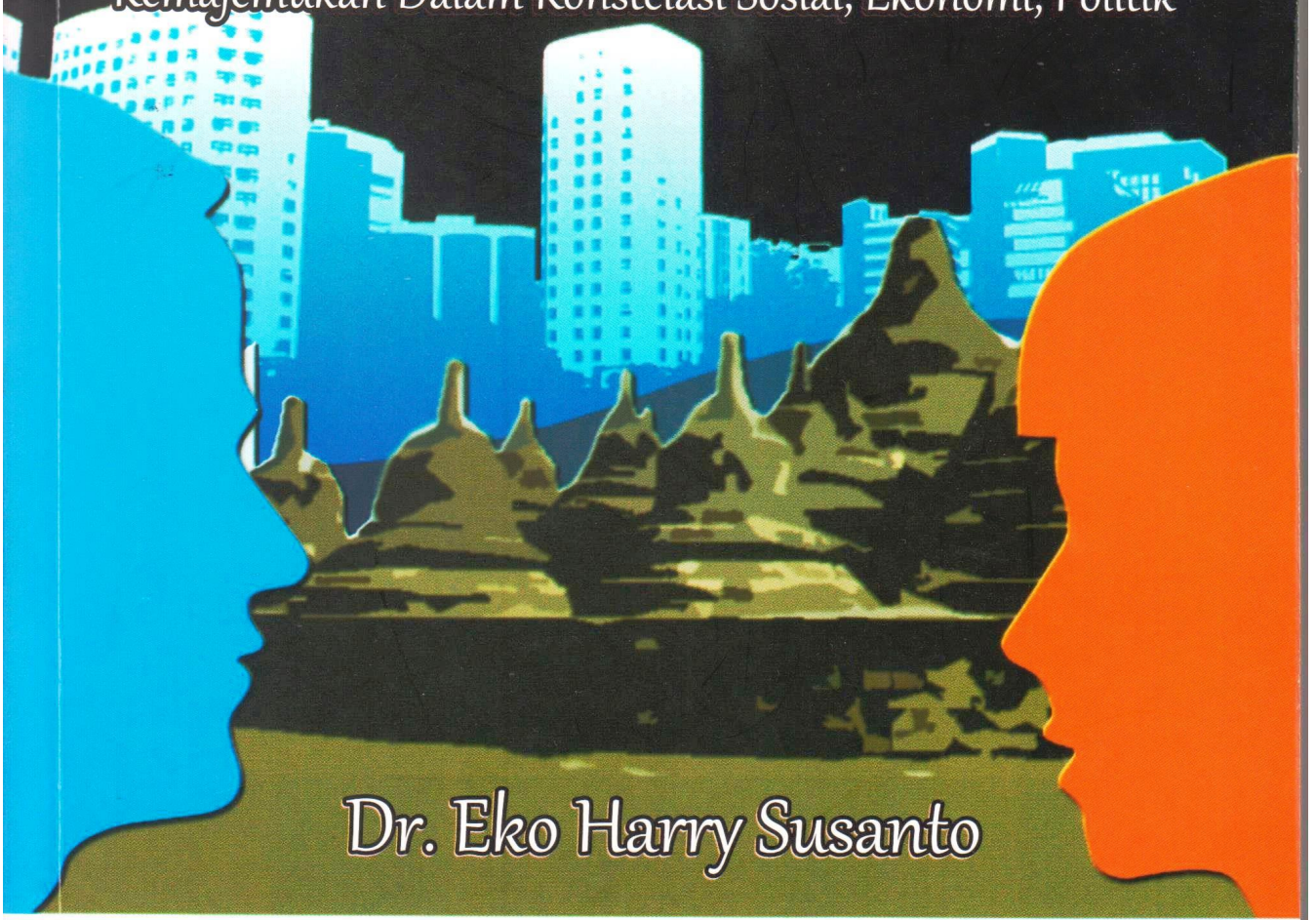

Dr. Eko Harry Susanto

Mitra Wacana Media
Penerbit

KOMUNIKASI
&
GERAKAN PERUBAHAN

Kemajemukan dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik

Dr. Eko Harry Susanto

Mitra Wacana Media
PENERBIT

KOMUNIKASI & GERAKAN PERUBAHAN

Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik

Dr. Eko Harry Susanto

Mitra Wacana Media
PENERBIT

Edisi Asli
Hak Cipta © 2016, Penerbit Mitra Wacana Media
Telp. : (021) 824-31931, 82423435
Faks. : (021) 824-31931
Website : http://www.mitrawacanamedia.com
E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Susanto Harry Eko

Komunikasi & Gerakan Perubahan

Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2016

1 jil, 17 x 24 cm, Hal 204

ISBN: 972-602-318-169-8

1.Fisip 2. Komunikasi & Gerakan Perubahan
I. Judul II. Dr. Eko Harry Susanto

KATA PENGANTAR

Buku berjudul Komunikasi dan Gerakan Perubahan: Kemajemukan Dalam Konstelasi Sosial, Ekonomi, Politik mencoba untuk mengingatkan perjalanan komunikasi di Indonesia masa sebelum reformasi politik tahun 1998. Wajah komunikasi di negara yang menjunjung tinggi kemajemukan, lalu lintas pesan didominasi oleh pergulatan masyarakat dalam mencari, memperoleh dan menggunakan informasi yang selalu bersentuhan dengan pemerintah beserta organ kekuasaannya.

Kalaupun muncul pengakuan, bahwa komunikasi dalam bingkai kekuasaan negara mampu membangun keselarasan dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja hal yang wajar. Karena memang tidak muncul gejolak berarti dalam menyikapi aliran pesan linier dengan segala keperkasaannya yang represif. Bermuara pula pada betapa langkanya perlawanan terhadap isi pesan yang dikelola pemilik otoritas informasi. Pemberitaan media juga tanpa hiruk pikuk mengeksplorasi perbedaan pendapat. Semua poros komunikasi yang ada di masyarakat, harus sejalan dengan piramida organisasi kekuasaan dalam perspektif integralistik.

Tidak dapat dinafikan, hak komunikasi dalam struktur kekuasaan negara, analog dengan upaya menutup rapat, bahkan membungkam lalu lintas bicara maupun hak menyampaikan pendapat berbeda. Dalam jerat aliran pesan tunggal yang dijejali variasi klise epigon kekuasaan, rakyatpun wajib beradaptasi dengan jargon keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang kerap muncul dalam retorika elite. Tetapi sesungguhnya, bukan berarti rakyat tidak memiliki kehendak menyuarakan perbedaan, sebab semangat itu tetap melekat, walaupun berisiko jika muncul di permukaan. Ketidakberdayaan dalam komunikasi jelas tidak dapat dilepaskan dari belantara regulasi, yang kurang memberikan ruang berbeda pendapat sekecil apapun menyangkut kebijakan negara.

Kendati demikian tidak bisa diabaikan, ada upaya elite di tubuh kekuasaan negara beserta organ-organ politiknya yang berusaha membangun kemajemukan, meskipun terbatas pada penampang luar komunikasi publik yang sangat politis. Kondisi ini tidak menjadikan rakyat merasa puas terhadap hak komunikasi yang dimiliki. Semakin lama

muncul kejenuhan, dan kerinduan untuk berubah menuju komunikasi yang lebih bebas. Dan kesempatan untuk berubah itu, akhirnya muncul juga sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Hak komunikasi yang teramat sempit dalam belenggu harmoni integralistik, menjadi hak komunikasi yang luas didukung semangat perubahan.

Memang tidak serta merta menciptakan kebebasan dalam pola interaksi dan komunikasi, mengingat elite dalam kekuasaan negara yang berlindung dibalik belantara peraturan masih tetap mengatur dan mengendalikan lalu lintas informasi di masyarakat. Dengan kata lain, ada perubahan dalam komunikasi, tetapi pola komunikasi antara pemilik kekuasaan dan rakyat yang tidak seimbang masih mewarnai kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Interaksi antara elite dan rakyat pada umumnya, tetap menyisakan jarak kekuasaan yang dilembagakan demi untuk memperoleh keistimewaan peran dihadapan khalayak.

Dalam perjalanannya, komunikasi datar yang diwarnai oleh peran berbagai institusi pengendali pesan, dan media massa yang lebih mirip kepanjangan tangan pemilik kekuasaan, semakin menghadapi tantangan karena ketidakmampuan menghentikan kehendak rakyat yang ingin berubah. Beragam sumber informasi di luar ordinat negara tumbuh subur karena dukungan teknologi komunikasi. Kepentingan pemilik modal yang berfokus pada pengembangan usaha juga mendorong tuntutan perubahan perilaku masyarakat maupun elite dalam kekuasaan negara.

Budaya material perusahaan yang berkembang pesat membawa nilai perubahan, berjalan seiring dengan geliat politik kekuasaan pemegang otoritas di tubuh pemerintah. Keeratan hubungan pemilik modal dengan elite politik dan birokrasi dalam kekuasaan negara menghasilkan pesan perubahan yang diproduksi secara massal untuk mempengaruhi rakyat agar mengikuti program-program pembangunan pemerintah yang didalamnya menyangkut kepentingan pemilik modal. Persoalannya, mengarahkan masyarakat yang mempunyai aneka perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan bukan perkara mudah. Dalam konteks kemajemukan etnik yang memiliki konstelasi sosial, ekonomi dan politik berbeda bukan hal yang gampang menanamkan kepercayaan terhadap perubahan. Sebab semua akan bermuara pada tuntutan perubahan yang memberikan keuntungan material sebagai ukuran kesejahteraan. Pada sisi lain, yang seringkali diabaikan akibat mengedepankan keuntungan material adalah perubahan yang menghilangkan nilai sosial budaya masyarakat sebagai rujukan baku dalam kehidupan sehari-hari.

Kepedulian untuk mempertahankan karakteristik yang terikat oleh aspek sosial budaya disatu pihak, dan kehendak memperoleh keuntungan dipihak lain, selalu muncul bersamaan. Karena itu bukan mustahil terjadi benturan antara proses pencapaian modernisasi melawan warna tradisional yang menitikberatkan pelembagaan nilai sosial kultural. Karena itu, betapa rumitnya jika suatu kawasan desa tradisional yang didominasi

kehidupan agraris mengalami perubahan cepat akibat tumbuhnya pabrik – pabrik sebagai simbol industrialisasi yang dibangun pemilik modal.

Kawasan yang mengalami pertumbuhan fisik pesat dengan kehadiran pabrik, tentu saja menjadi magnit bagi orang yang ingin mencari penghidupan lebih baik. Berbagai kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain berkumpul dalam satu kawasan dengan tujuan sama untuk hidup lebih sejahtera. Namun keanekaragaman yang menimbulkan kompleksitas interaksi dan komunikasi, ternyata tidak menimbulkan konflik antar kelompok. Tidak ada perlawanan sengit terhadap simbol industrialisasi yang menjurus kepada keberingasan massa. Kalaupun ada konflik di masyarakat, dan protes terhadap keberadaan pabrik, tentu dalam skala kecil, tidak berkelanjutan dan dengan cepat pudar karena kekuatan birokrasi negara dalam mengendalikan situasi. Pada konteks inilah klaim pemerintah yang berkuasa selalu muncul dalam retorika klise, perlunya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang dalam koridor stabilitas nasional.

Menyimak buku ini, tidak berlebihan jika berharap muncul interaksi dan komunikasi yang erat antar kelompok berbeda nilai, sikap dan kepercayaan di masyarakat. Namun harus dalam perspektif lebih demokratis yang memberikan hak komunikasi seimbang. Dengan demikian bukan penafsiran sepihak demi kepentingan elite dalam lingkup kekuatan politik pemerintah berkuasa. Kerinduan tanpa gejolak di masyarakat, tentu dapat dimaklumi, sebab kondisi pasca reformasi politik tahun 1998, media massa maupun media alternatif setiap saat menyuguhkan aneka pertikaian, konflik, keberingasan massa, dalam belenggu perilaku sub-nasional, komunalisme, sektarianisme dan sejumlah tindakan yang bermuara pada semangat melembagakan perbedaan. (Artikel seputar konflik antar kelompok dapat dibaca di lampiran buku ini)

Dalam dinamika komunikasi sebagai perjalanan sejarah bangsa, dari era yang terbungkam sampai menuju kebebasan berbicara, adalah pelajaran berharga yang harus dijaga dan dipahami. Demokratisasi komunikasi dengan tuntutan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan merata tanpa diferensiasi sosial politik harus berakar pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Bagaimanapun juga ini pilihan terbaik yang mampu membangun masyarakat informasi Indonesia berkeadilan.

Buku ini merupakan potret Indonesia sebagai kawasan majemuk yang berjalan damai. Tetapi disisi lain, kebhinekaan, keanekaragaman dan pluralisme pada masa sebelum reformasi politik tumbuh menjadi jargon klise dalam bingkai Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang dinilai membahayakan integrasi nasional. Lebih parah lagi, perilaku otoritarian pengendalian informasi menjadikan rakyat tidak mampu menyuarakan perbedaan meskipun dirugikan oleh berbagai entitas kekuatan negara. Buku ini juga mengupas dinamika kepemimpinan dari sudut pandang kelompok etnik berbeda, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada mereka yang sedang mempelajari kemajemukan komunikasi yang diwarnai oleh kepentingan kelompok.

Mengingat buku ini hasil penelitian ilmiah tahun 1995, maka menggunakan referensi pada kisaran tahun tersebut. Didalamnya memuat konsep, teori dan paradigma terkait dengan pengertian ilmu komunikasi yang paling sederhana sebagai proses penyampaian pesan sampai pada makna konotatif yang memiliki penafsiran kompleks di lingkungan masyarakat majemuk. Kendati demikian, unsur aplikasi komunikasi tetap dikedepankan, agar tidak terlepas dari ilmu komunikasi yang berada pada satu titik persimpangan berbagai ilmu pengetahuan. Dari penerapan ilmu komunikasi ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang kondisi faktual di kawasan multi etnik yang mengalami perubahanan pada masa pemerintahan sebelum reformasi politik tahun 1998 di Indonesia. Nilai positif dalam hubungan antar kelompok yang beretika, dapat dipakai sebagai referensi membangun kemajemukan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Sedangkan segala hal yang bernilai negatif dan berpotensi mengganggu kemajemukan harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi kebhinekaan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Harsono Suwardi, MA, Drs. Eduard Lukman, MA dan semua pihak di Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia yang memberikan masukan, pengarahan, dan selalu membuka ruang diskusi dalam penyelesaian penelitian yang memiliki sensitivitas terhadap "rasa aman" dan tingkat penolakan tinggi ketika menggali informasi di masyarakat. Terima kasih juga kepada Prof.Ir. Roesdiman Soegiarso, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta tempat penulis saat ini bekerja. Tentu saja saya juga berterima kasih kepada istri, Maya Ratnawati, anak-anak: Dekky. B.Wicaksono, SE., MM, Dennis A. Satrio, SE, dan Deffri I. Adiyanto. Dengan harapan melalui komunikasi terus belajar beradaptasi dengan dinamika perubahan yang positif. Kepada semua pihak yang mendukung penelitian ini termasuk partner diskusi di lokasi penelitian yang terdiri dari beragam profesi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **vii**
Daftar Tabel ..... **x**

Bab 1. Komunikasi Dalam Keanekaragaman Etnik **1**
A. Pemimpin Sebagai Sumber Informasi 1
B. Budaya Menjadi Landasan Komunikasi 5

Bab 2. Kepemimpinan Dalam Komunikasi Antarbudaya **11**
A. Kredibilitas Kepemimpinan Opini 11
B. Perubahan dan Eksistensi Media Massa 16
C. Komunikasi Antarbudaya Untuk Meminimalisir Perbedaan 24

Bab 3. Menggali Informasi Kemajemukan Etnik **33**
A. Transportasi, Industri dan Kompleksitas Komunikasi 33
B. Menjalin Hubungan Dalam Kemajemukan 34
C. Menelaah Karakteristik Keanekaragaman 38

Bab 4. Kawasan Komunikasi Multi Etnik **41**
A. Interaksi dan Komunikasi Dalam Pembangunan 41
B. Komunikasi Dalam Kemajemukan Etnik 44
C. Komunikasi dan Interaksi Sosial Sebagai Ikatan Harmoni 46
D. Media Komunikasi dan Interaksi Antar Kelompok Etnik 48

E. Media Tradisional Pemelihara Nilai Budaya 51
F. Pemerintahan Sebagai Pengendali Komunikasi 53

Bab 5. Interaksi Dan Komunikasi Berbasis Etnisitas..... 57
A. Penjaga Nilai-Nilai Sosial Tanah Kelahiran 59
B. Adaptasi dan Kedekatan Hubungan 63
C. Menanamkan Semangat Wirausaha dalam Kemajemukan 65
D. Kerja Keras Mewarnai Dinamika Kemajemukan..... 67
E. Mencintai Tanah Kelahiran Menghormati Desa Perantauan..... 69
F. Kemajemukan dalam Karakteristik Etnik..... 71

Bab 6. Kemajemukan Sosial, Ekonomi Dan Politik 79
A. Kesediaan Beradaptasi Dalam Bingkai Kesetaraan 80
B. Berinteraksi dan Berkomunikasi Menjadi Wirausaha 83
C. Kelugasan Sebagai Landasan Keeratan Hubungan 85
D. Kohesivitas Sosial dalam Kompleksitas Kemajemukan 88

Bab 7. Menjalin Hubungan Dalam Kemajemukan 91
A. Komunikasi Dalam Penghormatan Nilai Budaya 91
B. Merajut Hubungan, Mengembangkan Usaha 94
C. Mengedepankan Pendirian dalam Adaptasi 96
D. Menjaga Martabat dan Tradisi dalam Kemajemukan..... 98

Bab 8. Kepemimpinan Dan Ekspresi Masyarakat 103
A. Kekuasaan Komunikasi Sebagai Agen Modernisasi..... 103
B. Mengkritisi Peran Penggerak Perubahan 104
C. Kredibilitas Tokoh Dalam Bingkai Pluralisme..... 109

Bab 9. Kekuasaan Politik Dalam Kemajemukan 119
A. Komunikasi dan Dua Kutub Kontradiktif Penggerak Perubahan..... 119
B. Keberadaban Komunikasi dalam Pembaharuan 122

Bab 10. Membangun Komunikasi Antar Budaya 127
A. Kawasan Heterogin dan Pola Komunikasi Universal..... 127
B. Mengintegrasikan Perbedaan dalam Komunikasi Universal 136
C. Menelisik Perubahan Peran Pemimpin dalam Kemajemukan Etnik 140

Bab 11. Komunikasi antar Budaya Mendorong Perubahan..... 151
A. Saluran Komunikasi Sebagai Fondasi Perubahan 151
B. Komunikasi Antar Kelompok Etnik dan Rasionalisasi Perubahan 157

Bab 12. Kemajemukan Etnik Sebagai Pilihan 163
A. Menuju Kemajemukan Etnik Demi Kesejahteraan 163
B. Berfokus Pada Gerakan Perubahan 166

Daftar Pustaka..... 169
Lampiran 175

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identitas Informan Etnik Sunda 71
Tabel 2. Identitas Informan Etnik Jawa 73
Tabel 3. Identitas Informan Etnik Minangkabau..... 75
Tabel 4. Identitas Informan Etnik Batak..... 76
Tabel 5. Identitas Informan Etnik Madura 77
Tabel 6. Pendapat Kelompok Etnik Sunda tentang Kelompok Etnik Pendatang Dalam Hubungan Antar Etnik meliputi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik 130
Tabel 7. Pendapat Kelompok-Kelompok Etnik Pendatang Tentang Kelompok Etnik Sunda Meliputi Bidang Sosial Ekonomi Dan Politik 136
Tabel 8. Kepemimpinan Kepala Desa sebagai Agen Modernisasi ditinjau dari Kegiatan Sosial, Ekonomi dan Politik Berdasarkan Pendapat Kelompok Etnik Penduduk Asli dan Pendatang..... 143
Tabel 9. Pendapat Kelompok Etnik Penduduk Asli dan Pendatang Terhadap Kendala & Faktor-Faktor Pendukung Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Agen Modernisasi..... 152

BAB 1 Komunikasi Dalam Keanekaragaman Etnik

A. Pemimpin Sebagai Sumber Informasi

Komunikasi merupakan upaya membangun kesamaan makna yang mampu mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Dengan terbukanya akses komunikasi yang didukung fasilitas transportasi, maka perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi semakin mudah dilakukan. Kawasan yang semula homogen dari segi etnik, menjadi heterogen yang terdiri dari bermacam-macam kelompok etnik dalam satu wilayah. Keanekaragaman kelompok etnik, selain mencerminkan kemajemukan sosial ekonomi dan politik yang bermakna positif dalam bingkai kebhinekaan, juga berpotensi menimbulkan permasalahan krusial yang mengancam ketenteraman masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan seorang pemimpin yang dapat mengatasi berbagai persoalan masyarakat dan mampu mengelola kemajemukan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Secara substantif Stogdill (1974: 215), mengemukakan, bahwa kepemimpinan merupakan hubungan antar manusia, yang terjadi pada situasi dan terarah melalui proses komunikasi tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan Rogers dan Svenning (1989:223) menyebutkan, "kepemimpinan merupakan kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan". Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan suatu kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif sosial dan kesejarahan, pendapat lain yang lebih menitikberatkan kepada interaksi antara pemimpin dan pengikut adalah Sartono Kartodirjo (1986:vi) yang mengungkapkan bahwa " kepemimpinan dalam ilmu sosial tidak dapat diterangkan terlepas dari kolektivitas sosial dimana pemimpin bertindak". Dalam kolektivitas sosial terjadi proses interaksi antara pemimpin dan pengikut yang berpijak kepada, pertama

dengan kekuasaannya pemimpin mempengaruhi pengikut, sedangkan yang kedua, pemimpin berupaya untuk mengarahkan tindakannya menuju pada tujuan kolektif atau mempolakan kelakuan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku.

Pada konteks ini, kepemimpinan bukan semata-mata mampu mengkomunikasi tujuan yang hendak dicapai bersama, tetapi juga harus berpijak kepada nilai, norma dan karakteristik lingkungan disekelilingnya. Secara substantif, menghasilkan kepemimpian yang tidak tercabut dari akarnya dan tetap berpihak kepada pengikut sebagai khalayak yang mempercayai adalah kepemimpinan yang dikehendaki masyarakat.

Interaksi yang timbul antara pemimpin dengan yang dipimpin (pengikut) berhubungan erat dengan aspek komunikasi antar manusia, sebagaimana ditegaskan oleh oleh Bowers dan Bradac (*Communication Yearbook* 5, 1982:2) yang menyatakan bahwa, "komunikasi adalah tingkah laku individu dan merupakan hubungan antara berbagai tingkah laku dari pribadi-pribadi yang berinteraksi". Pendapat yang senada dikemukakan oleh Littlejohn (1992:3), bahwa komunikasi adalah sesuatu yang berarti dan penting, serta merupakan kumpulan dari bermacam-macam perilaku, kemampuan berkomunikasi dengan baik itulah yang membedakan manusia dan binatang.

Kemampuan berkomunikasi adalah sesuatu yang semestinya dimiliki oleh pemimpin, karena pemimpin mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk berkomunikasi dengan pengikutnya, sehingga pola komunikasi yang dipakai pemimpin sering menjadi sorotan yang menarik oleh masyarakat (Terry,1958:38). Hubungan antara kepemimpinan dengan komunikasi dinyatakan oleh Astrid S.Susanto (1977:81), komunikasi yang oleh banyak ahli didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu amanat disampaikan oleh seseorang (komunikator) kepada pihak lain (komunikan) sangat dipengaruhi oleh sikap atau pola kepemimpinan, disamping itu kepemimpinan juga berpengaruh terhadap intensitas komunikasi antar manusia dalam berbabagi kelompok yang ada di masyarakat.

Namun pemimpin di lingkungan masyarakat desa, sebagai basis kekuatan negara dalam menegakkan kebhinekaan bernegara, tidak bisa disamakan dengan pola kepemimpinan dalam institusi formal, yang hanya menetapkan aspek keuntungan dalam perspektif tujuan organisasi. Kekuasan politik dan ekonomi yang sarat dengan beragam ketentuan, seringkali tidak menghiraukan fleksibilitas komunikasi maupun interaksi antar manusia. Karena itu, mengingat hubungan antara pemimpin dan pengikut di lingkungan pedesaan tidak selalu merujuk pada aspek legal formal, maka masyarakat desa juga patuh terhadap kepemimpinan informal yang dipercaya sebagai sumber informasi bermanfaat bagi mereka.

Menurut Soerjono Soekanto (1981:179) kepemimpin formal atau *formal leadership*, adalah kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan yang dalam pelaksanaannya berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga dengan demikian daya cakupnya terbatas.

BAB 2

Kepemimpinan Dalam Komunikasi Antarbudaya

A. Kredibilitas Kepemimpinan Opini

Pengertian tentang kepemimpinan sangat beragam, tetapi pada prinsipnya dalam perspektif komunikasi, merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi orang-orang supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Haiman (dalam Stogdill,1974:7), menyatakan, "kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui prilaku orang lain". Sehaluan dengan itu, Keith Davis (1962:96) menegaskan, "kepimimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui komunikasi dan aktivitas lainnya secara bersemangat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan".

Sementara Ordway Ted (dalam S.R.Menta, 1972:3) berpendapat, "kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibat-akibatnya yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama mencapai beberapa tujuan yang ingin diperoleh". Sejalan dengan dua pendapat tersebut adalah apa yang dikemukan secara singkat oleh Everett M. Rogers (1969:223) bahwa "kepemimpinan sebagai kemampuan bertindak dan berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Berdasarkan uraian tentang kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk mempengaruhi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Tetapi kegiatan mempengaruhi tidak mudah dilakukan, mengingat ada berbagai macam kendala yang melekat dalam menjalankan peran kepemimpinan di masyarakat. Oleh karena itu, seringkali pemimpin menggunakan kekuasaan formal dalam nuansa "memaksa" untuk mempengaruhi masyarakat pada umumnya.

Upaya untuk mempengaruhi orang lain dalam konteks penggunaan kekuasaan (*power*) menurut Laswell dan Kaplan (dalam Robert A.Dahl,1978:47) berkaitan erat dengan otoritas yang melekat pada pemimpin. Kekuasaan pada konteks ini adalah

BAB 3

Menggali Informasi Kemajemukan Etnik

A. Transportasi, Industri dan Kompleksitas Komunikasi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Sedangkan Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1993:3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya.

Berdasarkan pendapat itu, maka pada dasarnya penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang biasanya untuk menjawab apa penjelasan yang lebih terinci mengenai gejala sosial yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian. (Manasse Malo & Sri Trisnoningtias, 1993:28). Sedangkan menurut Singarimbun (1989:4), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.

Dengan metode kualitatif diharapkan mampu mengetahui lebih mendalam terhadap fokus penelitian yang diamati. Karena penulis melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan subjek sehingga dapat melihat dan mengamati kehidupan mereka sehari-hari, mendengar mereka berbicara tentang dirinya dan pengalaman mereka sendiri. Penulis juga berpedoman, bahwa setiap subjek di dalam lingkungan kejadian (*setting*) itu dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan yang lain, tanpa pengecualian bahwa informasi yang diberikan bersifat negatif ataupun positif. Berpijak pada pedoman tersebut, berarti setiap kelompok etnik melalui informan mempunyai kedudukan yang sama dalam memberikan informasi tentang kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi yang berperan dalam melakukan perubahan kearah lebih baik.

Lokasi penelitian ini adalah, desa di kawasan tumbuhnya pabrik-pabrik, pada salah satu kecamatan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Dengan pertimbangan, wilayah

BAB 4

Kawasan Komunikasi Multi Etnik

A. Interaksi dan Komunikasi Dalam Pembangunan

Desa lokasi penelitian di kawasan pantai utara Kabupaten Karawang ini merupakan desa asli. Secara historis, desa asli sudah ada sejak zaman Hindia Belanda berdasarkan *Inlandse Gemeente Ordonnantie*/IGO. (Ndraha,1991: 6). Tahun 1979, desa diatur dan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam aspek legal, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukumyang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa, yang diharapkan oleh pemerintah dapat menguasai aktivitas-aktivitas yang ada dimasyarakat, untuk menunjang pembangunan pedesaan. Buddy Prasadja (1980:51) menyebutkan pelaksanaan pembangunan desa sangat tergantung pada upaya mendinamiskan masyarakatnya, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana maupun tenaga ahli untuk melancarkan pembangunan tersebut sangat terbatas,dengan demikian pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh pemerintah setempat.

Pendapat tersebut menunjukan, bahwa Kepala Desa lebih banyak terlibat dalam urusan partisipatif, yaitu urusan-urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan. Padahal urusan rumah tangga desa, dalam bentuk otonomi desa yang sudah melekat berdasarkan hukum adat setempat, jauh lebih luas dibandingkan dengan peran formal sebagai alat Pemerintahan Pusat.

Tetapi kenyataannya, bahwa otonomi desa semakin berkurang perannya. Menurut Ndraha (1991:7) bahwa aspek mengatur yang dipunyai Desa dalam bentuk otonomi sudah semakin merosot, karena satu persatu diatur oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Hak dan wewenang sebagai masyarakat hukum adat tidak berfungsi lagi dan diganti degan peraturan pemerintah, ini disebabkan antara lain oleh semakin heteroginnya penduduk desa sehingga sulit ditentukan hukum adat mana yang berlaku, dan sumber-sumber pendapatan desa banyak yang diambil alih oleh pemerintahan di atasnya.

BAB 5

Interaksi Dan Komunikasi Berbasis Etnisitas

Agen modernisasi atau agen pembaharuan, merupakan suatu profesi yang berupaya untuk mempengaruhi atau mengarahkan inovasi orang lain melalui strategi komunikasi yang adaptif. Dalam arti dapat diterima oleh semua lapisan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berbeda pada kondisi heteroginitas etnik di pedesaan.

Agen modernisasi diperlukan untuk mengintrodusir ide-ide baru dan memberikan umpan balik yang berasal dari masyarakat kepada perencana pembangunan di pedesaan. Sebagai kepanjangan tangan dari lembaga yang berorientasi pada pembaharuan biasanya mempunyai berbagai macam perbedaan dengan masyarakat misalnya dalam status sosial ekonomi, kemampuan administratif atau teknis dan lain-lainnya yang menyebabkan terjadinya konflik dan kesulitan berkomunikasi. Oleh karena itu sebagaimana pendapat Rogers dan Svenning (1969:101), agen modernisasi diharapkan sebagai orang marginal yang sebelah kakinya berada di lembaga pembaharu, dan sebelah kaki lainnya diletakkan pada sistem kliennya.

Di kawasan pedesaan ini, Kepala Desa sebagai agen modernisasi di lingkungan desa yang transisional. Dari desa tradisional menuju kearah desa modern, yang menghadapi banyak masalah pelik sebagai akibat langsung, maupun tidak langsung dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di desa

Dari asumsi tersebut di atas penelaahan terhadap agen modernisasi di lingkungan keanekaragaman etnik di desa kawasan jalan Daendels ini, akan mencakup pada karakteristik orang-orang yang memberikan informasi sesuai dengan inti permasalahan yang dieksplorasi. Informan dari desa terdiri dari kelompok etnik Sunda, penduduk asli desa lokasi penelitian dan kelompok etnik pendatang. Pengamatan terhadap interaksi dan komunikasi kelompok-kelompok etnik yang ada di desa, dan posisi kepemimpinan Kepala Desa sebagai agen modernisasi, menitik beratkan pada kelayakan Kepala Desa sebagai agen modernisasi berdasarkan pandangan kelompok-kelompok etnik, dan kendala serta faktor-faktor pendukung peran sebagai agen modernisasi di pedesaan.

BAB 6

Kemajemukan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hubungan antar etnik di desa Kawasan Pantai Utara Kabupaten Karawang Jawa Barat berlangsung dalam suasana hidup berdampingan yang akrab tanpa sekat berarti. Interaksi dan komunikasi diantara kelompok-kelompok etnik penduduk asli dengan etnik pendatang terus berlangsung. Sementara itu interaksi di lingkungan warga pendatang yang berlainan kelompok etnik, juga berjalan sesuai dengan kebutuhan, tujuan interaksi dan komunikasi masing-masing. Tujuan komunikasi sendiri, menurut Reardon (1987: 1) untuk menghibur, mempengaruhi, beramah-tamah, memperoleh informasi, menunjukan perhatian dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan mendalam, bahwa hubungan sosial yang dilakukan oleh warga setempat masih cukup kuat dan dipelihara terus-menerus, misalnya penghargaan terhadap orang-orang tertentu. Sikap ini adalah salah satu karakter budaya Sunda sebagaimana dikemukakan oleh Suhamihardja (dalam Ekadjati, 1984:213-214), bahwa hubungan sosial pada Orang Sunda merupakan tingkatan-tingkatan, sehingga kewajiban masyarakat bertingkat-tingkat pula, dan harus bersifat kekeluargaan.

Dalam interaksi dan komunikasi diantara masyarakat desa yang beraneka ragam etnik, berlaku pula nilai universal yang sebenarnya dipunyai oleh masing-masing kelompok etnik. Seperti menurut Orang Batak, supaya berhati-hati dalam bertutur kata, karena pada kata melekat efek yang baik dan buruk, kita dapat membawa berkat atau bencana, kata buruk, makian, kata penghinaan, kata yang mengandung kutukan, semuanya membangkitkan kejahatan. (J.C. Vergouwen, 1986;108), atau sikap yang melekat pada orang Minangkabau, kusut menyelesaikan dan keruh menjernihkan. (Lily S. Halim, 1989)

Sikap positif semacam ini pada hakikatnya juga berlaku pada semua kelompok etnik. Pola universal lainnya yang menonjol adalah berhubungan dengan sifat modernisasi sebagaimana dikemukakan oleh Cyril E. Black (1976) yaitu kesadaran terhadap harga diri orang lain, bersedia menerima pengalaman-pengalaman baru, percaya terhadap keadilan dalam pembagian. Pluralisme etnik dengan substansi modernisasi yang terjadi di desa adalah sejalan dengan fenomena Berger yang menyatakan, modernitas berarti hidup

BAB 7

Menjalin Hubungan Dalam Kemajemukan

A. Komunikasi Dalam Penghormatan Nilai Budaya

Orang Jawa menyatakan karakteristik yang dimiliki adalah menjaga norma, sopan santunnya tinggi, tidak menonjolkan diri, rajin dan taat pada pimpinan, gotong royong dan sejumlah sifat positif lain yang juga dimiliki oleh orang dari kelompok etnik lainnya. Pendapat tentang kelompok etnik Sunda dipilah dalam interaksi sosial, politik dan ekonomi sedangkan terhadap etnik lainnya dalam bentuk satu kesatuan pendapat.

Di pedesaan kawasan pantai utara Pulau Jawa yang majemuk, orang-orang Jawa menilai Orang Sunda di desa lokasi industri bersifat terbuka dan ramah. Meskipun kadang-kadang muncul sikap pembelaan terhadap kelompok etniknya dalam bingkai persaingan, seperti halnya dalam olah raga, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada sikap etnosentrisme berlebihan yang dapat menghambat komunikasi antar budaya. Informan A, tokoh masyarakat di lingkungan di desa lokasi penelitian, menyebutkan: "*Dalam pertandingan olahraga memang bisa saja muncul para supporter warga desa setempat yang cenderung membela orang yang satu kelompok etnik. Memang dalam situasi yang penuh dengan persahabatan dan humor, sehingga tidak menyebabkan permusuhan di luar lapangan bulutangkis maupun volley".*

Pernyataan-pernyataan dalam nada stereotip, walaupun bukan dalam kemasan negatif yang dilontarkan Orang Sunda terhadap Orang Jawa, berhubungan dengan setting pertandingan yang memanas namun penuh semangat kekeluargaan. Selain itu, teriakan pendukung pertandingan olah raga di desa tetap memiliki tanggung jawab dalam komunikasi, sehingga jauh dari suasana yang tidak menyenangkan. Menurut Samovar, Porter dan Jain (1981), tanggung jawab etis dalam komunikasi antar kelompok harus dijaga demi untuk menjaga hubungan baik antar pihak-pihak yang berinteraksi.

Dalam perspektif Orang Jawa, Orang Sunda di desa adalah pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan ibadah. Orang Jawa menghormati ketaatan beribadah kelompok etnik penduduk asli di desa lokasi penelitian. Siklus hidup manusaia selalu

BAB 8

Kepemimpinan Dan Ekspresi Masyarakat

A. Kekuasaan Komunikasi Sebagai Agen Modernisasi

Elite memiliki kekuasaan komunikasi yang sangat besar di pedesaan, karena mampu untuk menyebarkan pesan-pesan dalam berbagai kesempatan formal maupun non formal di masyarakat. Dengan kata lain, elite berjumlah sangat sedikit, tetapi mempunyai pengaruh besar dalam komunikasi dengan rakyat dalam konteks piramida kekuatan politik. Diatara sejumlah elite pedesaan, kepala desa sebagai elite politik dalam bingkai formal, mempunyai posisi strategis sebagai poros komunikasi pedesaan yang interaktif maupun linier. Namun dalam situasi tertentu, ketika struktur kekuatan politik di atasnya menghendaki pencapaian kepentingan dalam perspektif pemerintah, maka kepala desa akan menggunakan komunikasi top-down yang memerintah dan mengontrol dengan ketat kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga desa.

Memang kepemimpinan kepala desa, harus difokuskan kepada pencapaian kesejahteraan ke arah yang lebih baik sebagaimana konsepsi modernisasi. Pada konteks ini, sebagai orang nomor satu di desa, sudah selayaknya jika kepala desa tampil dalam posisi agen modernisasi. Hakekatnya, jika berpijak kepada tugas dan tanggung jawab yang melekat, perubahan ke arah lebih baik menyangkut bidang kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Kegiatan sosial mencakup pembinaan masyarakat terhadap generasi muda, kerohanian, pendidikan, olah raga dan kesenian. Bidang ekonomi atau perekonomian masyarakat, mencakup peningkatan produktivitas pertanian dan upaya-upaya yang menunjang sektor industri dan perdagangan. Sedangkan kegiatan bidang politik adalah tindakan kepala desa dalam hubungannya dengan pemilihan umum dan praktek politik yang berupa penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis sebagai pendukung pemerintah.

Informasi berdasarkan pendapat dari penduduk asli etnik Sunda maupun kelompok etnik pendatang yang terdiri dari etnik Jawa, Minangkabau, Batak dan Madura, mempunyai berbagai macam variasi tentang pola-pola kepemimpinan kepala desa dalam

BAB 9

Kekuasaan Politik Dalam Kemajemukan

A. Komunikasi dan Dua Kutub Kontradiktif Penggerak Perubahan

Keanekaragaman etnik di desa lokasi penelitian membentuk pola interaksi dan komunikasi di lingkungan penduduk asli. Mereka berubah mengikuti pola interaksi dan komunikasi yang universal. Menurut Rogers dan Svenning (1969:223) kondisi tersebut dilukiskan sebagai perubahan dari interaksi yang homofili menuju kepada heterofili. Homofili menggambarkan pihak-pihak yang berinteraksi memiliki kesamaan-kesamaan sedangkan heterofili adalah ketidaksamaan pihak-pihak yang berinteraksi.

Pandangan dan sikap-sikap warga desa penduduk asli yang menganggap bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin yang harus dipatuhi dan diteladani dalam semua tindakannya, sebagaimana dikemukakan Mustapa (1985:172) bahwa, "Orang Sunda menganut falsafah; Orang harus pandai berbakti kepada pemimpinnya, tidak boleh munafik atau merasa terpaksa". Namun persoalannya, dalam kondisi dinamika desa, sikap ini sudah berubah akibat interaksi dengan berbagai kelompok etnik pendatang, terpaan media massa, dan tujuan kesejahteraan material yang jauh lebih menonjol dibanding mejaga nilai-nilai sosial yang harmoni. Perubahan perilaku masyarakat ini sejalan dengan pendapat Aminati Etizoni (1964) yang menyatakan bahwa modernisasi menyebabkan otoritas tradisional mulai memudar.

Dipihak lain, kelompok-kelompok etnik pendatang yang datang ke desa kawasan pantai utara, karena tujuan-tujuan ekonomis dalam perpektif modernisasi, ternyata tidak setiap tindakan mencerminkan universalitas dalam sebagaimana sikap yang terikat oleh modernisasi. Sebab sebagaimana menurut Samovar dkk, kultur yang masih tampak menonjol, dalam interaksi dengan kelompok etnik lain akan semakin menguat, bahkan dalam memandang suatu persoalan masih mempunyai kecenderungan negatif terhadap kelompok lain tersebut. (Samovar, Portner, dan Jain 1981). Hakikatnya, pada satu sisi mengadopsi nilai modernisasi, tetapi di sisi lain masih mempertahankan nilai-nilai tradisional kelompok. Ini kecenderungan yang terjadi di banyak negara sedang

BAB
10

Membangun Komunikasi Antar Budaya

A. Kawasan Heterogin dan Pola Komunikasi Universal

Heterogenitas pedesaan dilihat dari keanekaragaman etnik dalam suatu desa, merupakan dampak perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Kondisi ini dapat dilihat dari mobilitas yang tinggi dalam migrasi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu singkat. Keanekaragaman etnik, tidak hanya membawa dampak keragaman budaya, tetapi membentuk keanekaragaman sosial masyarakat yang sedang mengalami perubahan semua aspek kehidupan.

Perubahan juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat, maupun pemimpin formal di pedesaan. Mereka tidak lagi berinteraksi dalam situasi homofili, tetapi bergeser dalam kontak-kontak heterofili dengan orang-orang diluar kelompok etniknya, yang mempunyai aneka perbedaan dalam cara berkomunikasi maupun berinteraksi. Dalam suasana heterofili, masyarakat desa lokasi penelitian di kawasan pantai Utara Pula Jawa, dapat hidup berdampingan, berinteraksi dan berkomunikasi dengan para pendatang dari berbagai kelompok etnik. Sementara interaksi diantara warga pendatang yang berlainan etnikpun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan komunikasi masing-masing. Tujuan komunikasi menurut Reardon (1987:1), untuk menghibur, mempengaruhi, beramah tamah, memperoleh informasi, menunjukkan perhatian dan lain-lain. Dengan demikian, keanekaragaman etnik juga membangun komunikasi dengan aneka tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan, seringkali muncul persamaan antara satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Kondisi inilah yang dapat menyatukan perbedaan dan membentuk harmoni kehidupan majemuk di pedesaan.

Tentu saja selain persamaan diantara kelompok-kelompok etnik, memang ada pola universal yang dimiliki oleh semua kelompok etnik, meskipun dalam mengekspresikan dalam komunikasi verbal berlainan. Misalnya kelompok etnik Batak percaya bahwa, *"orang harus berhati-hati bertutur kata, karena pada kata melekat efek yang baik dan buruk, kata buruk makian, kata penghinaan, kata yang mengandung kutukan, akan membangkitkan*

BAB
11

Komunikasi antar Budaya Mendorong Perubahan

A. Saluran Komunikasi Sebagai Fondasi Perubahan

Keanekaragaman budaya di pedesaan menciptakan pola keragaman sosial dalam kehidupan di desa. Disisi lain masyarakat membentuk komunikasi dan interaksi yang lebih bersifat universal, untuk tujuan ekonomis sebagaimana dalam prinsip modernisasi menurut Berger, yang salah satu intinya adalah, hidup dan berinteraksi dengan sejumlah besar orang asing diluar kelompoknya dengan tujuan utama transformasi kehidupan material yang lebih baik (Peter L. Berger, 1990:43-46). Berdasarkan asumsi ini, keanekaragaman etnik mengakibatkan berbagai macam perubahan dalam aspek sosial ekonomi yang berkembang dan menciptakan tujuan rasional, untuk mencapai kesejahteraan material. Namun disatu segi nilai, sikap dan kepercayaan diri budayanya masih tetap dipelihara oleh masing-masing kelompok etnik.

Sebagaimana telah dijelaskan, media massa merupakan suatu saluran penting yang mendorong besar warga desa untuk melakukan perubahan, maka pandangan masyarakat, juga diwarnai oleh keterlibatan mereka dengan media massa. Lerner (1992) menyatakan, bahwa media massa merupakan kekuatan dinamis dalam modernisasi untuk menyebarkan hasrat hidup baru yang lebih baik dengan kesejahteraan yang faktual. Rogers melengkapinya dalam kaitannya dengan masyarakat desa sebagai berikut: meskipun eksistensi media massa ini diakui sebagai faktor yang menunjang perubahan, tetapi saluran komunikasi untuk menciptakan perubahan di pedesaan mencakup dua saluran yaitu media massa dan komunikasi interpersonal. Dua Pendapat ini terasa cocok dengan kondisi desa Pantai Utara Jawa di Kabupaten Karawang Jawa Barat ini. Pada satu sisi masyarakat masih mengandalkan pola-pola tradisional dalam komunikasi antar pribadi untuk menyebarkan pesan atau isu-isu pembangunan yang mereka terima dari pemuka pendapat. Sementara itu, terpaan media massa yang bertubi-tubi mengakibatkan informasi yang terdapat dalam media massa dianggap sebagai sumber informasi yang

BAB 12

Kemajemukan Etnik Sebagai Pilihan

A. Menuju Kemajemukan Etnik Demi Kesejahteraan

Desa kawasan pantai utara di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini, mempunyai masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok etnik penduduk asli desa, dan kelompok etnik pendatang. Keanekaragaman etnik terjadi sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang membelah desa agraris penghasil padi dan sayuran. Tersedianya jalan tol Jakarta-Cikampek yang melengkapi jalan negara pantai utara sebelumnya yang dikenal pula sebagai jalan Daendels, menyebabkan mobilitas yang tinggi, sehingga banyak individu maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan, datang mencari penghidupan lebih baik ke desa ini. Melihat lokasi yang strategis, para pemilik modal juga untuk mendirikan pabrik-pabrik di desa. Orang-orang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia juga berbondong-bondong datang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai di pedesaan yang subur dan dipenuhi pabrik-pabrik modern.

Munculnya pabrik di desa sebagai salah satu simbol industri dan modernisasi, menjadikan desa lokasi penelitian ini berkembang dengan pesat ditinjau pembangunan fisik dan perubahan non fsik yang terikat oleh tumbuhnya nilai-nilai baru di masyarakat yang lebih komersial, dan mulai meninggalkan pola-pola perilaku sosial dan kekerabatan yang sudah melembaga. Kehadiran orang-orang dari berbagai daerah yang berlainan etnik, menjadikan penduduk asli desa yang mempunyai pola hidup bertani, mengalami persoalan baru dalam bidang kehidupan disekelilingnya. Penduduk asli yang notabene masih tradisional dalam perilaku sosial-ekonomi, tiba-tiba dipacu untuk menyesuaikan dengan pola hidup industri yang serba rasional, dan berhadapan dengan para pendatang yang memiliki perilaku dan gaya hidup berbeda dengan norma-norma pedesaan yang dianggap harmonis. Perbedaan-perbedaan sikap dan perilaku ini, tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan yang tersembunyi maupun yang nyata dalam kehidupan masyarakat desa. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat desa yang masih bercorak agraris,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Altman, Irwin dan Dalmas Taylor.1973. *Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationship*, New York: Holt, Rinehart & Winston

Barth, Fedrik. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya,* Jakarta: UI Press

Bass, Benard M.1981. *Stogdill's Handbook of Leadership, A Survey of Theory And Research,* New York: The Free Press, New York

Berger, Peter L.1982. *Pyramids of Sacrifice: Political Ethics And Social Change,* Terjemahan Rachman Tolleng, Jakarta: LP3ES

Berger, Peter L.1990. *The Capitalist Revolution, Fifty Proporsitions about Prosperity, Equality And Liberty,* Terjemahan Mohamad Oemar, Revolusi Kapitalis, Jakarta: LP3ES, Jakarta

Black, Cryill E.1976. Comparative Modernization: *A Reader,* New York: The Free Press.

Bogdan, Robert Dan Steven J. Taylor.1992. *Introduction To Qualitativ Research Methods,* Terjemahan Arief Furchan, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional

Bowers John W and James J.Bradac.1982. *Issues in Communication Theory: A Metatheoritical Analysis,* Communication Yearbook 5.

Dahl, Robert A, *Modern Political Analysis,* New Delhi, Prentice Hall of India, 1978.

Damanik, Jahutar. 1974. *Hukum adat Simalungun,* Medan: P.D. Aslan

Davis, Keith.1962. *Human Relation At Work,* Tokyo: Mc.Graw Hill Book Co, Inc, Kogakusha Co Ltd

Depari, Edward dan Colin MacAndrew. 1988. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

De Vos, George & Ross R. Lola, ed. 1982. *Etnic Identity-Cultural Continuities And Change*, Chicago: The University of Chicago Press

Ekadjati,Edi S.1984. *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya,* Jakarta: Giri Mukti Pustaka

Etzioni, Amitai and Eva Etzioni.1964. *Social Change,* New York: Basic Book

French, Wendel L.1978. *The Personnel Management Process,* Fourth Edition, Boston: Hougton Miffin Company

Geertz, Hildred.1981. *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia,* Jakarta: YIIS dan FIS-UI

Giddens, Anthony.1986. *Capitalism And Social Modern Theory: An Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber,* terjemahan Soeheba Kramadibrata. Jakarta: UI Press

Gudykunst, William B.1988. *Culture and the Development of Interpersonal Relationship,*Communication Yearbook 12.

Hall, Edward T.1976. *Beyond Culture,* New York: Anchor Book

Hall, Edward T & William Foote White. 1974. *Experiences in Commuication,* Wayne Austin Shrope (ed),, New York, HBJ

Warper.1977. *Dictionary of Modern Thought,* New York Harper And Row

Havelock, Ronald.G.1973. *The Change Agent's Guide Innovation in Education,* Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications.

Hennesy, Bernard.1990. *Public Opinion* terjemahan Amiruddin Nasution, Jakarta: Penerbit Erlangga

Horton, Paul & Charles L. Hunt.1980. *Sociology,* New York: Mc.Graw Hill: Book Company

Jahi, Amri (ed).1988. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan Di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar,* Jakarta: PT. Gramedia

Kartodirdjo, Sartono, (ed).1990. *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial,* Jakarta: Penerbit LP3ES

Katz, Daniel dan Robert L. Kahn.1966. *The Social Psychology of Organization,* New York: John Willey And Sons

Kim, Young Yun.1988. " *Communication And Acculturation"* dalam Samovar and Porter,Intercultural Communication: A Reader, Belmont California: Wadsworth Publ. Co

Lee, Everett S.1987. *A Theory of Migration*, Yogyakarta: PPK Universitas Gadjah Mada

Menta, SR.1972. *Emerging Pattern of Rural Leadership*, New Delhi: Willy Eastern

Miller, G.R, And M. Steinberg.1975. *Between People, A New Analysis Of Interpersonal Communication,* Chicago Science Research Associates

Miller G.1963. *The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information, Psychological Review*

Mills, C. Wright.1963. *The World Outside And The Picture In Our Head,* dalam Alan Costy (ed) Mass Media And Mass Man, New York: Rinehort And Winston

Moleong, Lexy J.1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT.Remaja Rosda Karya

Munir, Rony dan Prijono Tjiptoherijanto.1981. *Penduduk dan Pembangunan Ekonomi,* Jakarta: Bina Aksara

Mustapa, R.H. Hassan.1985. *Adat-Istiadat Orang Sunda,* terjemahan Maryati Sastrawijaya, Bandung: Penerbit Alumni Bandung

Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers.1982. *Managing By Communication,* Mc.Graw Hill International Book Co

Nasution, Zulkarimein.1988. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya,* Jakarta: Rajawali Pers

Ndraha, Taliziduhu.1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa,* Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Nimmo, Dan. 1993. *Komnikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media,* Terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung: PT.Rosda Karya

Nimmo, Dan. 1989. *Komuikasi Politik: Khalayak dan Efek,* terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung: PT.Rosda Karya

Noer, Deliar.1983. *Administrasi Islam di Indonesia,* Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Prasadja, Buddy. 1981. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya di Pedesaan,* Jakarta: Rajawali Pers

Rachmat,Jalaluddin.1985. *Psikologi Komunikasi,* Bandung: Penerbit Remaja Karya

Ray, Michael L.1973., *Marketing Communication And The Hirarchy of Effects,* dalam Model For Communication Research, Peter Clarke (ed), Baverly Hill: Sage Publication

Reardon, Kathleen.1987. *Interpersonal Communication*: *Where Minds Meet,* Belmont, California: Wadswoth Publishing Co

Riwukaho, Josef.1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers

Robbin, Stephen P.1980. *The Administrative Process,* New Delhi: Prentice Hall of India

Rogers, Everett M. 1985. *Komunikasi Pembangunan,* terjemahan Dasmar Nurdin, Jakarta: Penerbit LP3ES

Rogers, Everett M And Ronny Adhikarya. 1978. *Communication And Inequitable Development: Narrowing The Socio-Economic Benefits,* Media Asia 5

Rogers, Everett M and Lynne Svenning.1969. *Modernization Among Peasant,* New York: Holt, Rineheart and Winston Inc

Rogers, Everett M.1971. *Diffusion of Innovations,* TNew York: The Free Press

----------, 1971. *Komunikasi dan Pembangunan,* Jakarta: Penerbit LP3ES

Rogers Everett M and Floyd F. Shoemaker.1971. *Communications of Innovations, A Cross Culture Approach,* New York: The Free Press

Rogers, Everett M & F. Floyd Shoemaker.1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru,* terjemahan Drs. Abdillah Hanafi, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional

Rogers, Everett M and Lawrence Kincaid.1981. *Communication Networks,* New York: The Free Press

Ruben, Brent D.1988. *Humman Communication And Cross Culture Effectiveness,* dalam Samovar and Porter, Intercultural Communication: A Reader, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co

Samovar, Larry A, Richard E. Porter and Nemi C. Jain.1981. *Understanding Intercultural Communication,* Belmont, California: Wadsworth Publishing Co,

Silverman, David.1993. *Interpreting Qualitative Data; Methods for Analysing Talk, Text and Interaction,* Sage Publications

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi.1989. *Metode Penelitian Survey,* Jakarta: Penerbit LP3ES, Jakarta

Smart, Reginald.1988. *Religion-Caused Compilcation Communication,* dalam Samovar and Porter, Intercultural Communication: A Reader, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co,

Smelser, Neil.1964. *Toward a Theory of Modernization,* dalam Amitai Etzioni And Eva Etzioni, Social Change, England: Cambridge University Press.

Soekanto, Soerjono.1981. *Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan ke tujuh,* Jakarta UI Press

Soesanto, Astrid S.1977. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek,* bandung: Penerbit Binacipta

Suwardi, Harsono.1993., *Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia,* Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

Tehranian, M.1979. *Development Theory And Communication Policy The Changing Paradigm* dalam Voight And Hanneman (Ed) Progress in Communication Sciences Vol. 1, Noorwood, NJ: Able Publishing Co.

Terry, George R.1958. *Office Management And Control*, Illinois: Richard D. Irwin Inc Home Word

Tjokroamidjojo, Bintoro.1980. *Pengantar Administrasi Pembangunan,* Jakarta: Penerbit LP3ES, Jakarta

Toha, Miftah. 1994. *Perilaku Organisasi,* Jakarta: Rajawali Pers

Van Den Ban, A.W.1981. *Interpersonal Communication And The Diffusion of Innovation,* dalam Extension Education And Rural Developmnet, Bruce R. Crouch And Shankariah Chamala, New York: John Willey And Sons

Vergouwen, J.C.1986. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba,* Jakarta: Penerbit Pustaka Azet

Vredenbregt, J.1980. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat,* Jakarta: Penerbit P.T Gramedia

Widjaja, A.W.1985. *Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila,* Bandung: Penerbit Armico

Wright, Charles R. 1975. *Mass Communication: A Sosiological Prespective,* New York: Random House

Artikel

Black, Joe F. 1979. *Perbandingan Sistem Politik,* Yogyakarta: UGM

Dahlan, Alwi. 1983. *Budaya Komunikasi di Indonesia: Beberapa Pengamatan,* Jakarta: LIPI

Hassan, Ahmad Mustapa. 1983. *The Mass Media as An Agent of Change,* Media Asia Volume 10

Koentjaraningrat. 1977. *Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong,* Berita Antropologi No.30 Tahun IX

Lee, Everett S. 1987. *A Theory of Migration,* terjemahan Hans Daeng, PPK, Yogyakarta: UGM

Liliweri, Alo. 1994. *Prasangka Sosial dan Komunikasi Antar Etnik,* Jakarta: Prisma, LP3ES

Medis, Piyasoma. 1980. *Communication And Community Development,* Media Asia Volume 7

Muis, Abdul. 1983. *Some Implications of Television Exposure Among Traditional Peasants: A Case from South Sulawesi Island,* Media Asia 10

Muis, Abdul. 1984. *Communicating New Ideas to Traditional Villagers: An Indonesian Case*, Media Asia 11

Sendjaja, Sasa D. 1991. *Peranan Ilmu dan Ilmuan dalam Menjawab Perubahan Dunia Komunikasi,* Seminar Nasional Ilmu Komunikasi, Surabaya

Soesanto, Astrid S. 1974. *Komunikasi dan Media,* dalam Prisma No: 3, Jakarta: Penerbit LP3ES

Tjahjono. 1989. *Pusat sebagai Ide dalam Landskap Jawa,* Jakarta: LP-UI.

Sumber yang Tidak Diterbitkan

Halim, Lili Sontani.1989. *Istilah Kekerabatan Dalam Bahasa Minangkabau,* Thesis, UI

Hardjana, Andre A.1994. *Budaya Organisasi: Sebuah Kerangka Pemahaman,* Jakarta

Silalahi, Ullert. 1989. *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan,* Thesis, UI

Soeaedi, Saleh, *Elite dan Pembangunan di Madura,* Thesis, UI, 1986.

Sumber Lain

Kompas, tanggal 16 Juli 1995 dan 15 November 1995.

Laporan Kepala Desa 'Lokasi Penelitian' Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1995.

Monografi Desa 'Lokasi Penelitian' Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1994.

Monografi Desa 'Lokasi Penelitian' Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1995.

Nova, Tabloid Mingguan, No 394/VIII tanggal 10 September, Jakarta, Tahun 1995

Rencana Umum tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan, Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Tahun 1992/1993.

Ummat, Majalah Dwimingguan No:21, Tahun 1996.

Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah,* Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, Jakarta, 1984.

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa,* Kantor Menko Ekuin dan Wasbang, Jakarta, 1984.

Lampiran

Pluralisme dan Retorika Politik
Oleh: Eko Harry Susanto
(Kompas, 31 Maret 2009)

Menjelang Pemilu 2009, isu pluralisme seolah-oleh menjadi senjata ampuh bagi sejumlah partai politik yang selama ini dikenal memiliki massa yang cenderung homogin dari aspek ideologi.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana pluralisme memang menjadi orientasi total, dalam arti bukan sekadar retorika, tetapi ada kesungguhan mengaplikasikan konsep keanekaragaman dari sudut universal. Sebab, gencarnya perbincangan tentang pluralisme dari elite politik akhir-akhir ini, ternyata belum bisa merasuk ke massa di akar rumput, yang sesungguhnya sebagai sasaran agar menyadari betapa pentingnya semangat kebhinekaan dalam kehidupan bernegara.

Konflik antar ataupun intra kelompok yang tidak kunjung usai di berbagai wilayah tanah air, prasangka (*prejudice*) yang dipelihara secara terlembaga terhadap komunitas lain yang berbeda dalam nilai, sikap dan pandangan dunia (*worldview*), dan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan kebenaran sepihak, merupakan bukti faktual bahwa kesediaan hidup dalam keanekaragaman yang harmonis menjadi barang mahal.

Dalam penelaahan tentang keanekaragaman masyarakat, Diana L. Eck (2007), intinya menyatakan bahwa, pluralisme merupakan keterlibatan secara energetik dengan keragaman, bukan toleransi tetapi pencarian secara aktif untuk memahami perbedaan-perbedaan. Pluralisme juga bukan relativisme, tetapi komitmen, berbasis kesediaan untuk berdialog-mengritik dan mau dikritik.

Dari pernyataan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang harus dilakukan oleh partai politik yang gencar menyuarakan pluralisme. Mereka harus bersedia menempatkan orang-orang dari luar garis ideologi utamanya, dalam sebuah jabatan politik strategis,

demi menciptakan sebuah sinergi partai. Mensinkronkan kekuatan dari kelompok yang beraneka ragam dalam sebuah semangat pluralisme, adalah pencapaian (*achievment*) positif partai, sehingga akan memiliki pengaruh besar di masyarakat.

Eksistensi di masyarakat yang heterogin adalah tujuan utama, oleh karena itu, partai politik sebaiknya mengkampanyekan perlunya toleransi. Memang tampak sederhana bagi para politisi atau sekelompok elite, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa prasangka kelompok masih terus hidup di berbagai komunitas. Oleh karena itu partai harus mencari perbedaan yang ada di masyarakat, dan memanfaatkannya sebagai salah satu landasan, dalam membangun basis partai yang kuat.

Prinsipnya, partai politik mengemas dan mendiseminasikan perbedaan bukan sebagai ancaman yang menakutkan bagi konstituen mayoritas partai, tetapi justru sebaliknya, bisa membentuk sebuah komunitas dalam tubuh partai plural yang kuat. Namun persoalannya, masih terlampau banyak, diferensiasi yang ada di masyarakat justru diorganisasikan untuk membangkitkan semangat kelompok.

Jika konsisten berpijak pada ide keanekaragaman, alangkah baiknya jika partai politik tidak selalu mengunggulkan keyakinan dasar secara sepihak. Sebab partai plural, adalah sebuah komitmen "kebersamaan" terhadap perbedaan. Walaupun, sesungguhnya orientasi terhadap pluralisme, tidak perlu menanggalkan maupun mengisolasi identitas ideologisnya. Justru keberagaman adalah kekuatan sejati dalam demokrasi bernegara.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa jalan menuju kondisi itu memerlukan proses panjang. Partai politik harus tidak bosan-bosannya membuka dan memfasilitasi dialaog integratif antar kelompok di akar rumput sebagai basis konstituen, bukan dalam seminar dan diskusi elite yang tidak membumi. Ini mubazir karena tidak memiliki implikasi langsung di masyarakat. Harus diakui saat ini, betapa langkanya dialog antar kelompok yang langsung melibatkan rakyat kebanyakan, demi memperkuat semangat kebhinekaan.

Kalaupun partai politik gencar menyuarakan pluralitas, tetapi pemaparan Elizabeth Fuller Collins, dalam tulisan tentang Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan?, di Asian Survey, Juli 2002, bisa membuat pesimis. Dikemukakan bahwa, kekerasan muncul karena kegagalan lembaga-lembaga politik dan hukum, untuk menyediakan perangkat/aturan bagi penyelesaian konflik, mengatasi keluhan penguatan identitas komunal untuk mengendalikan sumber ekonomi, dan penggunaan kekerasan oleh negara (*state-sanctioned violence*) untuk menghasut atau menekan konflik.

Tidak bisa dinafikan, meski banyak dibantah oleh elite politik dan pemerintah dengan aneka dalih, tetapi secara subsatansial konflik dan kekerasan di Indonesia seringkali dipicu oleh berbagai perbedaan yang menyangkut karakteristik etnik maupun keyakinan dasar sebuah kelompok. Jelas ini berpotensi mengganggu semangat keanekaragaman dalam dalam berpolitik di masyarakat heterogin.

Dengan kata lain, pluralisme yang nyaring disuarakan oleh partai politik, bisa saja hanya dianggap retorika yang tidak membumi di masyarakat, sehingga tidak akan berpengaruh banyak dalam menangguk konstituen pada pemilihan umum tahun 2009

Komunikasi Memperkuat Kebinekaan
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 26 Mei 2011)

Demokrasi politik pasca reformasi kenegaraan, memicu kekerasan antar kelompok dan mendorong menguatnya perilaku radikalisme, yang tidak lagi menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai landasan kehidupan bernegara.

Jika kondisi ini tidak diselesaikan secara tuntas dengan tindakan nyata, dalam arti hanya melalui jargon dan retorika pencitraan, maka pluralisme sebagai pilar kekuatan bangsa akan menghilang lebih cepat. Implikasi lebih jauh adalah munculnya disintegrasi bangsa berbais semangat sektarian, yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok.

Komunikasi Antar Kelompok

Tanpa mengesampingkan aspek legal, keamanan, dan pendekatan sosial dari pemerintah maupun sejumlah entitas yang peduli terhadap terjaganya kebhinekaan, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat berusaha meminimalisir konflik, melalui pendekatan komunikasi antar kelompok yang dapat menyatukan perbedaan.

Pendekatan komunikasi antar kelompok untuk meredam konflik, secara substantif menurut Samovar, Porter dan Mc.Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Titik tolak meminimalisir konflik adalah, menghilangkan nilai sektarian yang memiliki relasi kuat dalam menumbuhkan sikap komunalisme. Sebab, perilaku yang menutup diri terhadap kelompok lain ini berbahaya bagi masyarakat majemuk seperti di Indonesia.

Selain itu, komunalisme sebagai semangat kelompok, cenderung mematut-matut diri, bahwa nilai-nilai komunitasnya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Jika suatu kelompok merasa paling unggul, maka representasi yang mudah dideteksi adalah, mereka selalu menafsirkan bahwa nilai positif hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Pelembagaan sikap yang tidak menghiraukan nilai sosial budaya kelompok lain itu, akan menyulut pertikaian di lingkungan masyarakat yang multi etnik. Dengan

kata lain, menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis, sebagaimana harapan masyarakat.

Namun tantangan kebhinekaan, sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bukan sebatas berkembangnya semangat komunalaisme saja, tetapi minimnya empati dalam hubungan antar manusia, juga menjadi pemicu menguatnya semangat kelompok yang berpotensi mengabaikan kebhinekaan. Padahal, empati merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif yang mampu mengikat perbedaan dalam bingkai kebhinekaan yang harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara faktual, berbagai tindak kekerasan, radikalisme dan konflik antar kelompok di Indonesia memang dipicu oleh menguatnya semangat sub-nasional yang berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, melalui pendekatan komunikasi antar kelompok yang menghilangkan sekat sektarian dan komunalisme dalam bentuk semangat kebersamaan harus segera diwujudkan.

Namun yang lebih penting adalah, bagaimana elite politik dan elite dalam kekuasaan negara maupun tokoh masyarakat pada umumnya, mewujudkan komunikasi yang menjunjung tingi tolereransi terhadap perbedaan. Sebab, dalam belenggu kebebasan dengan dalih demokrasi, komunikasi antar kelompok yang integratif justru menghadapi tantangan berat.

Menyuarakan Kebhinekaan

Model kepemimpinan yang mampu menyatukan suara dalam bingkai "bebas dari kepentingan" kelompok, dan demi keadilan bagi semua orang, semakin langka ditemukan. Pola komunikasi antar elite di berbagai lapisan kekuasaan, juga tidak mencerminkan piramida kepercayaan masyarakat. Dalam arti, tidak ada satupun pimpinan yang mampu memposisikan sebagai pucuk sebuah segitiga informasi yang dijadikan rujukan utama, dalam berbagai penyelesaian konflik dan kekerasan yang bernuansa sektarian.

Memang tidak bisa dikesampingkan, bahwa kebebasan berkomunikasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus dikedepankan. Namun bukan berarti setiap elite bisa menyuarakan kepentingannya yang tidak lepas dari nilai kebhinekaan. Terlampau banyak komentar elite yang mengkritik kekerasan akibat komunalisme, menjadi suatu anti klimak di ujung kalimatnya yang penuh dengan basa-basi perkecualian.

Betapa banyaknya pembicaraan publik yang dieksplorasi media, jika ditelaah dalam bingkai objektif, secara terselubung berbalik arah seperti mendukung tindak kekerasan. Tentu saja retorika elite yang semacam ini, seperti memberikan pengesahan terhadap tindakan kekerasan berbasis perbedaan kelompok.

Mencermati kondisi itu, untuk menghilangkan naluri sub-nasional maupun komunalisme yang berpotensi memicu tindakan kekerasan dan radikalisme, tentu saja bukan sebatas menggalakkan nilai Pancasila yang disinyalir memudar.

Tetapi, yang lebih aktual untuk dilaksanakan adalah, bagaimana para elite memiliki kesepakatan dalam komunikasi yang mampu menjaga terpeliharanya masyarakat majemuk di Indonesia.Dengan kata lain, elite politik dan elite dalam kekuasaan negara, meskipun memiliki perbedaan ideologi dalam menyejahterakan rakyat, tetapi harus sepakat untuk melakukan komunikasi yang beradab, demi menegakkan kebhinekaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun persoalannya, dalam perangkap demokrasi integralistik yang menafikan perbedaan,dan demi meraih popularitas di masyarakat, para elite justru cenderung mengeksplorasi retorika yang bersifat sektarianisme, sebagai basis kekuatan kelompok. Oleh sebab itu,sangat wajar jika berkembang anggapan bahwa upaya mengikis semangat sektarian, berjalan seperti siklus, tampaknya maju ke depan tetapi sesungguhnya mengalami kemunduran.

Meredam Atau Melembagakan Konflik
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Pembaruan, 5 Januari 2012)

Demokrasi politik pasca reformasi kenegaraan yang mengunggulkan kebebasan, seringkali justru memicu konflik antar kelompok, yang tidak lagi menghiraukan eksistensi kebhinekaan sebagai basis kehidupan berbangsa di Indonesia.

Perbedaan kelompok, etnisitas, agama dan keyakinan dalam kerangka perbedaan "kepercayaan", mewarnai berbagai konflik yang terjadi pada tahun 2011. Catatan akhir tahun Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), terdapat 63 konflik terkait kebebasan berkeyakinan sepanjang tahun 2011. Kondisi tersebut, amat memprihatinkan, mengingat nilai kebhinekaan bangsa Indonesia sudah sangat dikenal luas. Berbagai kalangan internasional membanggakan, bahwa Indonesia mampu mengatasi kesulitan dalam menyikapi perbedaan, dan berhasil mewujudkan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebhinekaan menjadi sebuah kekuatan karena sejak dulu telah ada tradisi "*care and share*" yang tidak lain adalah semangat gotong royong, yang tumbuh diantara rakyat yang berjiwa ramah di alam yang kaya-raya (Shinzo Abe, 2007). Oleh sebab itu, seharusnya bangsa Indonesia, terus menjaga citra keanekaragaman yang sudah dikenal oleh masyarakat di manca negara tersebut.

Nilai Sektarianisme

Dengan tidak mengabaikan aspek legal-formal dalam upaya menjalankan hukum, menjaga keamanan nasional, dan melakukan pendekatan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat dalam memasuki tahun 2012, berusaha meminimalisir konflik melalui model komunikasi antar budaya, diantara orang-orang yang berbeda keyakinan dasar (nilai), sikap dan kepercayaan . Sebab perbedaan nilai, sikap maupun kepercayaan, akan selalu tumbuh secara alamiah dalam lingkungan masyarakat majemuk, dan tidak mungkin dicegah dengan cara yang mengunggulkan semangat kekerasan komunal maupun tindakan sektarian.

Pendekatan komunikasi antar budaya harus menjadi pedoman para elite untuk meredam konflik antar kelompok. Komunikasi diantara mereka yang berbeda budaya tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan pemahaman nilai dan makna bersama, yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik. Titik tolak menumbuhkan makna bersama diawali dengan, menghilangkan komunikasi yang terikat oleh kultur sektarianisme. Kultur ini menganggap nilai komunitasnya, lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain. Perwujudan sektarianisme sejalan dengan etnosentrisme ekstrim, yang menafsirkan nilai kebenaran, kejujuran, kesantunan bermasyarakat dan bernegara hanya dimiliki oleh kelompoknya.

Ruang Negosiasi

Jika sektarianisme dieksplorasi secara demonstratif, akan memicu semangat sub-nasional yang berujung kepada konflik antarkelompok di lingkungan masyarakat heterogin. Karena itu, yang harus dilakukan oleh para elite adalah memperkecil pemikiran sektarian dengan menghindari sikap yang tidak menghargai keyakinan dasar orang yang memiliki karakteristik budaya dan keyakinan berbeda.

Pelembagaan sikap sektarian dan komunalisme yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial budaya kelompok lain ini, diprediksikan akan dilakukan oleh sejumlah entitas politik, demi memperoleh dukungan massa menghadapi kondisi politik yang memanas di tahun 2012. Dikhawatirkan tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite, tampaknya akan semakin demonstratif mengelola "ketidakpercayaan" terhadap komunitas lain, sebagai salah satu ketahanan sosial kelompoknya. Jika ini terjadi, sudah barang tentu akan menyulut pertentangan dan semakin menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai.

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah, tidak bersikap antipati dengan kelompok yang berbeda, karena akan mendorong munculnya komunikasi eksklusif yang rentan pertikaian bernuansa sektarian. Karena itu dalam komunikasi dan interkasi di lingkungan masyarakat yang heterogin, harus berpijak kepada perilaku yang saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian perilaku di lingkungan masyarakat majemuk harus berjalan dua arah sebagaimana dikemukakan oleh Edward T.Hall dan William F. Whyte (2002), harus ada ruang-ruang negosiasi dalam setiap anggota kelompok, untuk menghargai nilai-nilai kelompok lain yang memiliki perbedaan. Jika penyesuaian diri berjalan tidak seimbang, akan berbahaya, karena mendorong munculnya rasa superior dari komunitas yang merasa unggul dalam jumlah maupun kualitas hidup.

Lebih celaka lagi, ketimpangan penyesuaian diri akan berdampak terhadap pelembagaan stigma negatif, yang menempatkan kelompok lain lebih rendah, tidak berarti dan marginal dibandingkan dengan kelompoknya. Dalam perspektif komunikasi antar kelompok, pelembagaan sigma merupakan sikap yang banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk. Meski sebagai hal yang umum, namun jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan. Terlebih lagi, pada tahun-tahun mendatang, politik komunalisme akan menguat sejalan dengan menghangatnya suhu politik menuju pemilihan umum 2014.

Secara empirik, berbagai konflik antar kelompok di Indonesia juga dipicu oleh pelembagaan stigma negatif dalam nuansa ”stereotip” yang melekat pada pihak-pihak yang bertikai. Mengekspresikan stereotip negatif terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan munculnya kecurigaan, kesangsian dan ketidakpercayaan terhadap pihak-pihak yang tidak disukai dalam interaksi dan komunikasi di lingkungan masyarakat majemuk.

Berpijak kepada pemahaman terhadap model komunikasi antar kelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, menerapkan pola interaksi antar kelompok yang membangun pemahaman nilai dan makna bersama untuk meredam konflik dan tindak kekerasan. Namun persolannya, dalam dinamika politik yang semakin menghangat di tahun 2012, nilai-nilai perbedaan tampaknya justru akan dilembagakan untuk memburu kekuasaan ataupun memperkuat keunggulan posisi kelompok dalam persaingan politik yang tidak menghiraukan lagi nilai kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Komunikasi dan Konflik Antarkelompok
Oleh: Eko Harry Susanto
(Bisnis Indonesia, 3 September 2012)

Konflik antarkelompok di Sampang Madura, semakin menambah daftar panjang keberingasan massa yang dipicu oleh perbedaan keyakinan, dan berlindung dibalik demokratisasi politik maupun kebebasan berekspresi pasca reformasi kenegaraan.

Perbedaan keyakinan seolah memicu berbagai konflik yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Data dari berbagai lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa konflik antarkelompok semakin mengkhawatirkan. Bahkan The Wahid Institute, selama 2011 sudah mencatat terjadi 93 kasus intoleransi beragama.

Sejumlah pihak menuduh bahwa negara tidak hadir dalam upaya mencegah terjadinya konflik, dan pemerintah dinilai gagal melindungi rakyat dari ancaman kerusuhan.

Memang dalam pembelaannya, institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketentraman warga, selalu mengedepankan langkah-langkah hukum dalam upaya mendeteksi terjadinya konflik dan keberingasan massa.

Oleh sebab itu, dengan tidak menafikan tindakan maupun pendekatan legal formal yang sudah dilakukan pemerintah, alangkah baiknya jika segenap elemen masyarakat yang peduli terhadap nilai-nilai kemajemukan, berusaha meminimalisir konflik melalui strategi komunikasi antarbudaya diantara orang-orang yang berbeda nilai, sikap dan kepercayaaan (belief).

Model komunikasi antarbudaya untuk meredam konflik, secara subtantif menurut Samowar, Porter dan Mc.Daniel (2005), adalah upaya menumbuhkan nilai-nilai bersama yang menghasilkan rasa aman, saling menghargai dan menghindari konflik.

Titik tolak meminimalisasi konflik adalah menghilangkan etnosentrisme yang menggap nilai-nilai kelompoknya jauh lebih unggul dibandingkan keyakinan yang dianut oleh kelompok lain.

Perwujudan etnosentrisme yang paling ekstrem dan mengkhawatirkan dalam masyarakat majemuk, adalah menafsirkan nilai kebenaran, kejujuran, kesantunan relasi antarmanusia, kehidupan bermasyarakat dan bernegara hanya dmiliki oleh kelompoknya.

Celakanya, jika etnosentrisme dieksplorasi secara demonstratif, berpotensi memicu konflik lingkungan masyrakat yang heterogen.

Gejala awal dari munculnya konflik ini adalah individu, kelompok maupun komunitas yang ada di masyarakat mengembangkan sikap yang bermuara kepada ketidakpercayaan (*lack of trust*) terhadap orang-orang yang memiliki karakteristik berbeda.

Oleh sebab itu, semua pihak yang ada di masyarakat, harus melakukan tindakan untuk memperkecil sikap etnosentrisme, demi untuk mencegah konflik antarkelompok.

Pelembagaan sikap etnosentrisme yang sejalan dengan sikap komunalisme, sektarianisme dan semangat sub-nasiona, yang tidak menghiraukan nilai-nilai sosial budaya kelompok lain, akan menyulut pertentangan di wilayah yang berpenduduk multi etnik.

Tindakan itu, semakin menjauhkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai, jika para tokoh masyarakat, pemuka pendapat dan sejumlah elite politik maupun elite dalam kekuasaan negara justru sengaja mengelola ketidak percayaan sebagai salah satu basis ketahanan sosial kelompoknya, faktor lain yang harus diperhatikan adalah selayaknya jika para tokoh masyarakat di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik, tidak melakukan penarikan diri (*withdrawl*) ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan kelompok yang berbeda.

Penarikan diri dalam relasi antarkelompok, mendorong munculnya komunikasi eksklusif yang berakhir dengan pertikaian, karena tidak memberikan kesempatan kepada komunitas lain untuk melakukan interkasi secara seimbang.

Di lingkungan masyarakat yang heterogen dari sudut entensitas, keyakinan dan budaya interaksi harus berpijak kepada upaya mengekplorasi kesamaan karakteristik dan mengedepankan empati kepada orang-orang yang bukan berasal dari kelompoknya.

Empati dalam perspektif komunikasi antarkelompok merupakan partisipasi emosional dan intelektual secara imajinasi pada pengalaman orang lain, atau secara sederhana di artikan, bagaimana menempatkan posisi diri sendiri dalam kedudukan orang lain.

Penghambatan empati terhadap entitasyang bebeda, akan menghambat harmonisasi dalam hidup bermasyarakat.

Kesulitan empati, biasanya terkait pula dengan stereotip, yang menggeneralisasikan kesamaan perilaku seseorang dengan karakter kelompoknya. Sikap ini dinilai emosional dan mengganggu pluralism yang diunggulkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wancana komunikasi antarbudaya, faktor streotip adalah sikap yang paling banyak mewarnai kehidupan masyarakat majemuk.

Perpecahan Masyarakat

Meski sebagai hal yang umum, jika dikemas dengan aroma kebencian dan sinisme, bisa menjadi biang keladi perpecahan masyarakat yang paling membahayakan.

Hakikatnya, berbagai konflik antarkelompok di Indonesia juga dipicu oleh faktor stereotip terhadap keyakinan dasar yang melekat pada pihak pihak yang bertikai.

Mengekspresikan stereotip terhadap kelompok lain, berhubungan erat dengan munculnya prasangka dalam bentuk kecurigaan, kesangsian dan ketidak percayaan terhadap pihak-pihak yang tidak disukai

Di sisi lain, prasangka terkait oleh sikap mendiskusikan sisi negatif orang diluar kelompoknya (*antilocution*) dan kecendrungan menghindar dari kelompok yang tidak disukai (*avoidance*).

Sikap diskriminatif ini, berujung kepada serangan fisik (*violence*) dan pemusnahan terhadap kelompok lain dengan cara satu per satu maupun massal (*extermination*).

Konflik horisontal antar kelompok yang berbeda keyakinan di Sampang Madura, merupkan perwujudan dari prasangka yang berujung kepada penyerangan fisik terhadap komunitas yang dinilai tidak sejalan dengan keyakinan dasar kelompok dominan yang ada di wilayahnya.

Dalam skala makro, konflik antarkelompok yang berbeda keyakinan di berbagai penjuru Tanah Air, seringkali diwarnai dengan serangan fisik yang merobek nilai-nilai kebinekaan masyarakat.

Berpijak kepada pemahaman terhadap strategi komunikasi antarkelompok, maka sudah sepantasnya jika segenap elite dalam tubuh pemerintah dan masyarakat pada umumnya, mengaplikasikan model interaksi antar kelompok secara konsisten demi mengembangkan kesadaran kolektif untuk mencegah konflik dan tindak kekerasan yang cenderung meningkat.

Namun persoalanya, dalam belenggu kebebasan, justru nilai-nilai perbedaan cenderung dipakai untuk mencari kekuasaan, ataupun memperkuat keunggulan posisi kelompok dalam persaingan yang tidak menghiraukan lagi nilai kebinekaan.

Keberingasan Massa dan Kegagalan Komunikasi Elite
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 9 September 2012)

Konflik antarkelompok yang dipicu oleh perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan, kembali mengoyak harmonisasi kehidupan masyarakat. Sumbawa sebagai salah satu basis pluralisme di Indonesia Timur juga terkoyak oleh pertikaian antar kelompok dalam jerat SARA yang membahayakan integrasi nasional

Secara esensial, konflik antar kelompok yang tidak menghiraukan nilai kebersamaan merupakan persoalan serius bangsa yang mengancam fondasi kebhinekaan. Oleh sebab itu, untuk mencegah ataupun meminimalisir konflik, para elite dalam kekuasaan negara, bukan hanya mengeksplorasi kecaman dengan berpijak pada aspek legal-formal,

tetapi harus mengedepankan strategi komunikasi berbasis empati terhadap kelompok masyarakat yang memiliki sejumlah karakter berbeda.

Namun yang menjadi persoalan, dalam menyikapi konflik antarkelompok, justru komunikasi para elite dalam tubuh kekuasaan, jauh dari sikap mengedepankan empati dalam kemajemukan. Justru yang dilakukan adalah menyalahkan pihak yang kalah atau mereka yang berbeda dengan karakteristik mayoritas sebagai biang keladi konflik maupun keberingasan massa. Ini sejalan dengan Jajak pendapat harian Kompas (10/12/20-12), yang menunjukkan bahwa, hanya 32, 3 persen responden yang menegaskan puas terhadap peran negara dalam menjaga kebinekaan, 60,8 menyatakan tidak puas, sedangkan 6,9 mengemukakan tidak tahu.

Padahal menurut Melvin Urofsky (2001:5), dalam menegakkan demokrasi dan mejaga kemajemukan, melindungi hak mereka yang terpinggirkan dan minoritas, harus tumbuh dari empati ataupun kehendak mayoritas dalam masyarakat. Penyejajaran kedudukan adalah bagian penting dari perkembangan demokrasi universal yang menghargai toleransi.

Semangat untuk menjadi makin inklusif dan mengulurkan tangan pada mereka yang memiliki keyakinan dasar tidak sehaluan dengan kelompok mayoritas, bukan hanya melindungi terhadap perlakuan semena-mena, namun harus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan yang setara, sebagai warga negara yang memiliki kesamaan hak serta tanggung jawab terhadap kemajemukan.

Empati Bukan Kekalahan

Dalam upaya membangun harmonisasi hubungan antar kelompok, mengedepankan empati merupakan sumber kekuatan hubungan integratif di lingkungan masyarakat majemuk (Samovar, Porter dan Jain, 2005). Mencaci, menyalahkan kelompok lain dari sisi negatif pada ruang-ruang publik, adalah amunisi yang dapat mendorong munculnya konflik yang menjurus kepada keberingasan massa.

Sebaliknya, dengan menggunakan komunikasi empati, yang memposisikan seandainya mereka yang berbeda adalah "kelompok saya", maka perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan justru menjadi kekuatan dalam mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika para pemilik otoritas dalam pemerintahan, menjalankan komunikasi yang mengeksplorasi empati terhadap kelompok berbeda nilai, sikap dan kepercayaan.

Memang tidak mudah mengedepankan empati, sebab mereka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjaganya pluralisme, malah terjerat oleh politisasi agama, etnis dan semangat sub-nasional, yang menafsirkan empati sebagai bentuk "kekalahan" menghadapi kelompok lain. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, perilaku empati terhadap keberagaman disejajarkan dengan tindakan membela kelompok lain yang berbahaya bagi pelembagaan nilai-nilai individual yang bersifat sektarian.

Mengutip pendapat Bennet (1979), bahwa empati adalah kejujuran diri sendiri dalam komunikasi antarkelompok yang memiliki karakter tidak sama. Berempati bukan berarti kehilangan jati diri yang mengabaikan norma yang diyakini secara individual maupun kelompok, tetapi hanya penundaan sementara terhadap identitas diri, dari atribut egosentris demi menghargai pihak lain.

Sejalan dengan itu, Hall (1967) juga menyatakan, individu berada dalam gelembung busa sabun yang selalu melekat dalam komunikasi dengan pihak lain tanpa kehilangan ruang privat yang memiliki batas jelas. Dengan kata lain, komunikasi yang empati merupakan ekspresi dari kejujuran penghargaan terhadap diri sendiri untuk menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman perilaku sosial ekonomi dan politik.

Menyikapi kondisi tersebut, yang menjadi pertanyaan, apakah para elite di tubuh pemerintahan yang pada umumnya terkooptasi oleh belenggu kekuatan politik praktis, bersedia mengedepankan empati ketika nafsu berkuasa dalam aroma pencitraan, dipakai untuk menarik dukungan massa. Jawabnya tentu teramat langka elite birokrasi "yang bermain politik" mau berempati secara jujur kepada mereka yang minoritas dan tidak menjanjikan dukungan politik.

Kalaupun komunikasi empati mewarnai blantika retorika para elite, semata-mata dalam bingkai formal yang tidak membumi. Jelas ini tidak sejalan dengan tindakan ideal, yang mensyaratkan bahwa, pesan empati untuk menjaga toleransi dalam kemajemukan harus dititikberatkan di lingkungan komunitas sendiri, bukan di ruang publik yang heterogin.

Aksioma komunikasi menegaskan, komunikasi empati dan pesan toleransi dalam koridor "homogenitas" jauh lebih efektif untuk diterima anggota kelompoknya, karena ada kejujuran, kelugasan dan jauh dari dramaturgi pencitraan.

Namun yang menjadi persoalan, jerat politik "kuantifikasi" dalam kontestasi memburu kekuasaan lokal maupun nasional, menunjukkan bahwa elite telah gagal membangun komunikasi yang empati terhadap mereka yang berbeda dan minoritas. Akibatnya, konflik antar kelompok dalam nuansa perbedaan nilai, sikap dan kepercayaan terus terjadi dan semakin memarginalkan fondasi keanekaragaman masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Negara, Konflik dan Empat Pilar Kebangsaan
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 23 Juli 2013)

Keberingasan massa di berbagi penjuru tanah air semakin mewarnai konflik yang bernuansa perbedaan agama, keyakinan dan kepercayaan. Bahkan potret buram ehidupan masyarakat majemuk itu seperti bersaing dengan upaya para elite dalam menyuarakan penegakan empat pilar kebangsaan yang bertumpu kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pedoman masyarakat dalam negara yang beradab.

Namun di pihak lain, negara sebagai entitas yang paling bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat, seperti tidak berdaya mengatasi aneka konflik yang muncul setiap saat. Karena itu tidak mengherankan jika berbagai kalangan menyebutkan bahwa pemerintah belum mampu melindungi masyarakat dari konflik dalam bingkai perbedaan agama dan keyakinan dasar yang muncul di berbagai lapisan masyarakat.

Menafikan Isu Sensitif

Walaupun secara faktual berbagai konflik, diwarnai oleh isu sensitif dalam belenggu perbedaan karakter dalam agama dan keyakinan, tetapi kita teramat jarang mendengar pengakuan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab di tubuh pemerintah, mengakui bahwa pertikaian, perseteruan, penyerangan dan kerusuhan yang terjadi bermotif perbedaan dalam keyakinan pada ranah keagamaan. Justru yang kerap terdengar adalah, elite dalam kekuasaan negara mengkambinghitamkan emosi masyarakat semata sebagai pemicu konflik antar kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Menafikan substansi perbedaan keyakinan daalam agama sebagai pemicu konflik, merupakan gambaran kelemahan negara dalam membangun integrasi nasional yang merujuk kepada penguatan empat pilar kebangsaan yang mengunggulkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Padahal oleh Rodney A. Smola (2001), menggarisbawahi, bahwa kekuasaan yang mengabaikan fakta di sekelilingnya dan menutup hak masyarakat untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dalam mengelola negara, akan menghancurkan kekuasaan pemerintah itu sendiri".

Karena itu, sudah selayaknya jika pemerintah transparan mengakui adanya konflik antar kelompok dalam nuanasa perbedaan agama dan keyakinan di berbagai berbagai wilayah nusantara. Dengan transparansi, maka pemerintah bisa membangun kesadaran masyarakat tentang perpecahan NKRI di depan mata. Bagaimanapun juga ketika para elite dalam poros-poros kekuasaan negara mereduksi fakta konflik, dengan mengeksplorasi

pemicu yang seringkali hanya persolan sepele, maka masyarakat juga menafikan bahaya perbedaan agama dan keyakinan di sekelilingnya.

Namun mereduksi fakta konflik bernuansa perbedaan termasuk ketidakmampuan mengatasinya, bukan hanya persoalan kinerja aparatur pemerintah menghadapi keberingasan massa. Sebab ada kecenderungan, berbagai entitas dalam tubuh pemerintah, melakukan pembiaran terselubung terhadap aneka bentrokan yang bersifat sektarian. Sikap ini mudah ditebak, mengingat elite dalam kekuasaan, memiliki ketergantungan terhadap kekuatan pihak-pihak yang bertikai untuk dijadikan pendukung dalam kompetisi politik lokal maupun nasional.

Pada konteks ini, sinyalemen Sidney Jones, dalam Kuliah Umum Hak Asasi Manusia di KontraS Jakarta, dalam satu kesempatan di Jakarta tahun 2011, menarik untuk dicermati. Secara esensial, dikemukakan, pegiat HAM kurang agresif untuk mendekati kalangan birokrat dan politikus dalam mewujudkan gagasan demokrasi yang mengusung kemajemukan.

Akibatnya, elite dalam pemerintahan lebih mengakomodasikan kekuatan komunitas berbasis nilai sektarian yang memiliki massa, dan mampu memberikan dukungan dalam persaingan politik, dibandingkan menjalankan roda pemerintahan untuk semua pihak tanpa diferensiasi agama dan keyakinan. Karena itu, tidak mengherankan jika kecenderungan perilaku sektarian tumbuh signifikan di lembaga-lembaga pemerintah. Jelas ini representasi dari kesepakatan para elite negara untuk "mematuhi" kehendak "pemilik massa" yang mempunyai kekuatan paksa mengontrol dari luar jalannya pemerintahan.

Tanpa Standar

Melalui komunikasi verbal dan non verbal, tentu tidak sulit mengenali berkembangnya semangat perbedaan di institusi negara yang notabene harus bertanggung jawab terhadap utuhnya kebhinekaan. Bahkan tidak aneh, entitas negara yang seharusnya gencar menanamkan pentingnya empat pilar kebangsaan pada usia belia, terperangkap juga dalam perilaku epigon membangun perbedaan sejak dini secara terselubung.

Karena itu, tanpa bermaksud mengedepankan pola penyosialisasian model Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang sudah menghilang pada era reformasi, tetapi pembentukan karakter "pluralisme yang menjaga empat pilar kebangsaan" di lembaga-lembaga pemerintah, dalam bingkai "demokrasi" harus ditegakkan. Tujuannnya agar aparatur pemerintah tidak semakin jauh terperangkap dalam penafsiran ideal terhadap nilai dan keyakinan dasar yang bersifat sepihak sesuai dengan pemilik otoritas di institusinya.

Memang kemasan dalam membangun karakter, sikap dan perilaku birokrasi pemerintahan sangat ideal, karena diwarnai oleh jargon, moto, kata-kata mutiara yang menyejukkan dalam nada menghargai eksistensi kelompok yang berbeda agama,

kepercayaan maupun keyakinan dasar. Namun terlampau sulit mengimbangi kekuatan pesan-pesan bernada "pembeda" yang sudah mendominasi berbagai lapisan dalam tubuh birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, tidak aneh jika konflik, pertikaian, kerusuhan dan keberingasan massa yang terjadi di tanah air, masih saja diwarnai oleh isu perbedaan yang berpotensi memarginalkan empat pilar kebangsaan. Sebab, hakikatnya, dalam masyarakat paternalistik sebagaimana di Indonesia, massa sesungguhnya hanya meniru tindakan organ-organ kekuasaan negara yang memiliki pengaruh dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Intoleransi dan Ambiguitas Elite
Oleh: Eko Harry Susanto
(Suara Karya, 06 Desember 2013)

Konflik dan bentrokan antar-kelompok massa dalam nuansa perbedaan agama maupun keyakinan yang memakan korban terus terjadi di berbagai penjuru Nusantara. Padahal, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri sudah memberikan tanggung jawab penanganan konflik kepada pemerintah daerah. Tetapi, peran elite politik dan kekuasaan negara di berbagai tingkatan, tetap memberikan kontribusi melembaganya konflik dalam nuansa intoleransi yang mengancam kebhinekaan.

Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mewanti-wanti perlunya kerukunan hidup beragama demi kelangsungan jalannya negara dan pemerintahan. Ketika berpidato di depan anggota DPR, Agustus lalu, Presiden SBY pun menegaskan untuk terus menjaga toleransi beragama dan berkeyakinan demi Indonesia yang damai dan berkeadilan.

Namun, pernyataan itu dinilai sudah tidak sesuai dengan kecenderungan para politisi dan elite di tubuh pemerintah yang lantang membingkai konflik dalam nuansa intoleransi secara terselubung. Pada umumnya mereka menolak bahwa munculnya konflik disertai kekerasan akibat perbedaan agama dan kepercayaan masyarakat. Mereka condong mencari penyebab lain, dari yang bersifat sederhana sampai kompleksitas pertikaian global dengan mengkambinghitamkan ketidakadilan perlakuan kelompok dominan terhadap mereka yang termarginalisasi.

Seharusnya elite politik maupun kekuasaan negara menjadi ujung tombak toleransi, bukan memanaskan situasi dengan menghubungkan pada ketimpangan politik internasional, dan menganggap remeh-temeh pemicu konflik di Indonesia. Wilbur

Schramm (1976), ahli komunikasi yang mendalami interaksi antar-manusia dengan damai, menyatakan pemerintah adalah aktor utama yang harus membangun jembatan penghubung antar-kelompok berbeda dengan menumbuhkan rasa saling bergantung antara satu kelompok dan kelompok lain.

Sikap 'toleransi abu-abu' seringkali muncul dari para pejabat publik di negara yang harusnya tetap menjunjung tinggi kebhinekaan. Dalam konflik Sampang yang hingga kini menyisakan pengungsi di negeri sendiri, misalnya. Bentrokan itu dinilai hanya persoalan pribadi yang sama sekali tidak berhubungan dengan perbedaan keyakinan. Sementara dalam konflik yang membawa korban harta dan nyawa di Lampung Selatan, sejumlah elite lokal dan nasional menyatakan bahwa pertikaian berdarah itu akibat masalah sepele di antara pemuda-pemudi setempat, yang dibesar-besarkan oleh SMS dan pemberitaan media.

Kemudian, dalam kasus penyerangan massa di Cikeusik Banten yang dieksplorasi dalam bingkai musibah di luar kekuasaan manusia. Sedangkan kerusuhan Temanggung Jawa Tengah, elite di tubuh pemerintah dengan ringan menyatakan bahwa keberingasan massa yang terjadi dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat, terhadap vonis terdakwa kasus penistaan agama yang bersifat sangat pribadi.

Akar Konflik

Elite di tubuh pemerintahan dan politisi seharusnya tidak mengingkari akar konflik karena perbedaan agama dan keyakinan yang tumbuh di masyarakat. Mereka perlu menyadari sebagai rujukan masyarakat pada umumnya, karena itu harus memiliki ketulusan dalam mengedepankan aspek faktual bahwa konflik maupun bentrokan antar-kelompok memang disebabkan oleh perbedaan agama dan keyakinan. Karena itu, selayaknya jika para elite mengedepankan perlunya hidup berdampingan secara damai. Di mana pun mereka berada sudah selayaknya konsisten menyuarakan pentingnya kemajemukan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman.

Secara esensial, menyuarakan perlunya toleransi beragama dan keyakinan bukan hanya dalam komunikasi di hadapan 'korban' demi menarik simpati yang berujung kepada meningkatnya elektabilitas menghadapi Pemilu 2014. Dalam berbagai kesempatan, khususnya di lingkungan 'kelompok sendiri' para elite politik dan pemerintah harus menyuarakan pentingnya kebhinekaan dan toleransi.

Memang, akibat jerat politisasi birokrasi di berbagai tingkatan pemerintah, para pejabat publik dalam upaya 'menggalang kekuatan', bisa saja dengan mudah menyalahkan korban konflik meskipun sebelumnya menyatakan prihatin terhadap kasus intoleransi. Karena itu, tidak mengherankan jika muncul pernyataan yang mengarah kepada pengunggulan nilai sektarian yang mengklaim kebenaran sepihak, membangkitkan komunalisme, melembagakan etnosentrisme dengan mengunggulkan etniknya sebagai

yang terbaik, dan menumbuhkan semangat sub-nasional yang tidak menghiraukan kebhinekaan bernegara.

Mencermati kondisi itu, sudah selayaknya jika pimpinan pada organ-organ kekuasaan pemerintah, tidak mereduksi adanya pertikaian agama dan keyakinan, dengan mencari kambing hitam konflik yang merugikan korban. Sebab, kejujuran dan transparansi berjalan linier dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Presiden SBY yang gencar menyuarakan perlunya toleransi dalam kehidupan beragama

Pertanyaannya, apakah Presiden SBY beserta sub-ordinat kekuasaannya mampu membangun jembatan antar-kelompok yang semakin rapuh dengan memberi perlindungan kepada mereka yang berbeda? Sebab, Laporan Human Right Watch Divisi Asia pada awal Maret 2013, bertajuk Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, menunjukkan bahwa pemerintah gagal melindungi kelompok minoritas dari berbagai kekerasan atas nama agama.

Tentu saja, penilaian kurang mengenakkan ini bukan gegabah, sebab elite dalam kekuasaan negara harus membuktikan dengan membangun toleransi faktual dan bukan sebatas menyalahkan kelambanan pemerintah daerah dalam merespon konflik dan mengeksplorasi jargon kemajemukan sebagai pemantas demokrasi dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.

Kebhinekaan Versus Legalitas Nilai Sektarian
Oleh: Eko Harry Susanto
(Kolom di Majalah Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia/ ISKI, Nomor 01/Oktober 2011)

Pentingnya kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah terlalu sering dieksplorasi di berbagai perhelatan politik tingkat lokal maupun nasional. Namun di sisi lain, kekerasan antar kelompok dan perilaku radikalisme yang menafikan kemajemukan justru semakin sering terjadi di berbagai pelosok tanah air.

Oleh sebab itu, menjadi pertanyaan disini, sejauhmana retorika tentang perlunya kebhinekaan dari para pemuka masyarakat, tokoh politik maupun elite dalam kekuasaan negara, benar-benar dipakai rujukan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu, benarkah mereka yang menyuarakan kemajemukan, konsisten menyuarakan di hadapan publik sendiri.

Sebab, disinyalir bahwa jargon-jargon kemajemukan yang dieksplorasi, hanyalah pemantas pidato para elite, ketika mereka berada di luar komunitas maupun kelompoknya.

Sementara itu, teriakan lantang mendukung pluralisme, hanya muncul pada saat perhelatan yang memang mengusung topik kebhinekaan bernegara.

Tentu saja sudah menjadi kelaziman, dalam hiruk pikuk berbicara di depan publik harus menyesuaikan dengan tema yang telah ditetapkan. Jadi, dengan kata lain, retorika kemajemukan, dengan segala atribut penghargaan terhadap keanekaragaman, semata-mata muncul dalam kemasan seremoni, yang mengutuk kekerasan dan radikalisme berbasis semangat kelompok.

Komunitas Internal

Padahal, di lingkungan masyarakat yang masih mengunggulkan nilai paternalistik, justru yang diperlukan adalah, menyuarakan pluralisme di lingkungan komunitasnya sendiri. Dikemukakan oleh Samovar, Porter dan Mc.Daniel (2005) dalam penelaahan tentang komunikasi antar budaya, bahwa mengeksplorasi fondasi keberagaman lebih tepat jika dimulai dari lingkungan kelompok sendiri, atau yang memiliki kesamaan dalam keyakinan dasar (*value*), kepercayaan (*belief*) dan pendangan terhadap alam semesta (*worldview*).

Tujuannya jelas, sebagai orang yang dipercaya di kelompoknya, massa ataupun pengikut tidak akan ragu-ragu menjalankan perintah untuk memelihara pluralisme dalam interaksi dan komunikasi antar manusia.

Secara substantif, toleransi terhadap kemajemukan harus diawali dari lingkungan sendiri, dalam situasi yang memiliki persamaan. Karena itu, kesungguhan elite dalam mendukung kemajemukan yang bisa dipegang sebagai acuan pengikutnya adalah, ketika yang bersangkuatn mendifusikan kebhinekaan di tengah komunitas yang memiliki nilai, sikap dan kepercayaan yang sehaluan dengan dirinya. Pada konteks ini, tentu saja termasuk komunitas yang berupaya menutup diri dan sensitif terhadap kelompok berbeda.

Pelembagaan Nilai

Namun sesungguhnya, sikap inkonsisten elite dalam mendukung kemajemukan, bukan semata-mata dipicu kebebasan politik yang mengabaikan kebhinekaan dan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tuduhan banyak pihak, yang mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Sebab, secara empirik, politisasi nilai sektarian yang menguat sesungguhnya didukung oleh kelompok elite di berbagai lembaga, termasuk dalam kekuasaan negara. Hegemoni nilai komunalisme yang mengunggulkan *worldview* kelompok, juga menghasilkan atribut, perilaku dan idiom Bahasa komunalisme, yang mengentalkan semangat perbedaan di masyarakat majemuk.

Celakanya, sampai saat ini, dengan dalih demokrasi dalam bernegara, maka politik pengabaian pluralisme yang bersifat sektarian, tetap dipelihara secara tersembunyi, melalui regulasi yang tidak sejalan dengan basis kebhinekaan.

Pelembagaan nilai sektarian dalam konteks legalitas, sudah tentu berdampak negatif terhadap eksistensi kebhinekaan, sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, masyarakat pada umumnya, menganggap bahwa semangat perbedaan dan komunalisme yang mengunggulkan norma kelompok, memang disahkan oleh negara, dan memperoleh dukungan dari elite yang memiliki otoritas kuat di masyarakat.

Karena itu, tidak aneh jika gegap gempita mendukung pelestarian Pancasila yang sarat nilai kebhinekaan, seperti tidak memiliki dampak berarti. Perilaku sektarian yang diwarnai oleh tindakan kekerasan antar kelompok dan perilaku radikalisme tetap menjadi gejala umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gegap gempita kebebasan komunikasi yang sejalan dengan menguatnya keanekaragaman sosial budaya, ekonomi dan politik di Indonesia tidak mudah dicapai. Tetapi melalui proses panjang melelahkan bagi yang konsisten memperjuangkan demokratisasi dan hak bicara. Dinamika komunikasi berjalan seiring dengan peristiwa pembelengguan hak mengungkapkan pendapat, hak mencari informasi dari sumber pesan yang dipercaya dan hak menggunakan informasi. Komunikasi pada level kelompok kecil sampai massa berhadapan dengan kutub - kutub kekuasaan negara yang memiliki kekuatan membungkam.

Dalam buku ini, dibahas tentang proses komunikasi antar kelompok etnik berbeda di suatu kawasan yang berubah akibat industrialisasi pada era sebelum reformasi politik tahun 1998. Pada satu sisi ada hubungan antar kelompok yang harmonis, tetapi pada sisi lain, dominasi piramida kekuasaan negara sedemikian kuat mengendalikan komunikasi semua entitas sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan hegemoni mengontrol lalu lintas pesan semakin perkasa seiring dengan dukungan pemilik otoritas ekonomi dan politik yang menguasai sedemikian banyak hak informasi rakyat.

Buku ini dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi, maupun mereka yang tertarik pada masalah komunikasi antar budaya dalam bingkai sosial, ekonomi, dan politik. Didalamnya terdapat pembahasan tentang komunikasi politik dalam keanekaragaman etnik, kepemimpinan dalam perspektif komunikasi antar budaya, upaya menjalin relasi dalam kemajemukan, strategi membangun keeratan hubungan dalam perbedaan, dan topik lain yang berkaitan dengan kompleksitas komunikasi dalam bingkai kemajemukan.

Dr.Eko Harry Susanto

Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Menyelesaikan pendidikan, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di Pekalongan. Tahun 1981 Lulus dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 1996 lulus Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Tahun 2004 meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Dr. Eko Harry Susanto, adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta, Tahun 2006 – Tahun 2014. Tahun 2014 sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Tarumanagara, Jakarta. Tahun 2010-2013 sebagai Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Pusat. Menulis buku "Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah" (2009), "Komunikasi Manusia : Esensi dan Aplikasi Dalam Sosial Ekonomi Politik" (2010), dan "Komunikasi Politik : Pesan, Kepemimpinan, dan Khalayak" (2013). Menuangkan gagasannya di Jurnal Ilmiah, dan menulis opini di Harian Kompas, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Sinar Harapan, Seputar Indonesia, Suara Karya, Jurnal Nasional dan Pikiran Rakyat Bandung, Jawa Pos dan media cetak lain.

Mitra Wacana Media
Penerbit

ISBN 978-602-318-169-8